

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN WILAYAH PESISIR
KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

SKRIPSI

Disusun Oleh :

HUMAIIDI AHMAD

45 10 042 026



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BOSOWA "45" MAKASSAR

2015

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN WILAYAH PESISIR
KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

SKRIPSI

Disusun Oleh :
HUMAIDI AHMAD

45 10 042 026



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA "45" MAKASSAR
2015**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN WILAYAH PESISIR
KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Teknik (S.T)



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA "45" MAKASSAR
2015**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

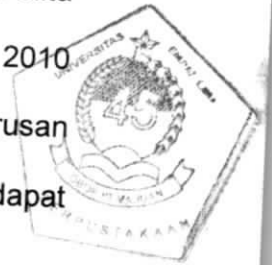


Humaidi Ahmad (45 10 042 062) Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar Judul Skripsi" **Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan**" Tempat/Tanggal Lahair Desa Pelita/24 Juni 1991 Jenis Kelamin Laki-laki, Status belum Menikah, Nama Ayah **Ahmad Hi Hasan**

Nama.Ibu **Nurmala Din.** Alamat Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan. No. HP 081 241 887 062.

Latar belakang pendidikan,SD Negeri Ambatu/Pelita (1997-2004), SMP Negeri 5 Bacan (2004-2007), Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Tunas Pelita Kecamatan Mandioli Utara pada tahun (2007-2010) dan pada Tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Universitas "45" Makassar (Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota) Selesai Pada Tahun (2010-2015) dan mendapat gelar sebagai sarjana Teknik (S.T)

Selama menempuh pendidikan, penulis mengikuti organisasi dalam kampus maupun diluar kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah Dan Kota (HMPWK) dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Halmahera Selatan (HIPMA HAL-SEL)



sebagai mahasiswa yang suda menjadi syarat mutlak dalam menuju jenjang profesional untuk memperoleh gelar sarjana starata satu (S1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa "45" Makassar.

Penulis menyadari selama ini dalam penelitian hingga dalam penyusunan hasil penelitian terdapat berbagai kesulitan namun berkat spirit dari kedua orang tua dan orang-orang yang terdekat dengan penulis yang selalu membantu berupa moril maupun materil, sehingga penyusunan laporan hasil penelitian dapat di selesaikan dengan baik, Oleh karna itu penulis berterimah kasih kepada :

1. **Kedua Orang Tua** Ayahanda Tercinta **Ahmad Hi Hasan** dan ibunda yang terkasih **Nurmala Din** yang selalu taburi kecintaannya dan perhatian yang penuh kasih sayang dan selalu mendoakan agar penulis tetap tegar dalam menghadapi hidup ini, karnanya kalian adalah Inspirasiku dan pengorbanan yang di berikan kepadaku begitu besar namun kesemuaan itu tak mampu terbalaskan dengan apapun,oleh karnanya Skripsi ini ku persembahkan untuk kalian dan adik-adikku, **Ismail Ahmad, Azman Ahmad dan Ramadhan Ahmad** semoga Alla Ta'ala menghimpun kita dalam samudra cinta-Nya dalam dekapan kasih-Nya di bawa bendera Al-mustafa dan keluarganya yang suci.

2. Bapak **Ir. Rudi Latief M.Si** selaku pembimbing 1, Bapak **Ir. Syamsuddin Margolang M.Si** selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan sumbangsi pemikiran dan arahan yang rasional selama proses astensi skripsi ini
3. Dari pihak instansi Kabupaten Halmahera Selatan yang telah banyak membantu dalam pemberian Data-data yang menjadi kebutuhan dalam penyusunan Skripsi ini
4. Bapak **Ir. Syamsuddin Margolang M.Si** selaku ketua jurusam perencanaan wilayah dan kota, Ibu **Rusneni ST,M,Si** selaku sekertaris Jurusan ,dan Staf jurusan Ibu **Rosmini** dan juga para Dosen pengajar yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pencerahan intelektual dan bantua moral maupun moril selama mengikuti proses perkuliahan.
5. Terimah kasiku yang terkhusus ibunda yang tercinta **Ibu Ros** sebagai Staf Fakultas Teknik perencanaan Wilayah dan Kota yang telah banyak membantu.
6. Kepada Teman-temanku Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Angkatan 2010 **Arif, Alwan, Bojes, Ardi, Adil, Sekar, Herdi, Anto, Alun, Ijal, Iki, Rahman, Udin, Ilyas, Irawan, Hasrul, Adhim, Engka, Uci, Fajrin, Hasdin, Ari, Pandu, Uga, Ugra, Ajul, Aswar, Acca, Fiko, Baron, Sahdim, Yanuwaris, Rizki, Geritzen, Tiwi, Aristi ,Gusti, Ani,**

Mega, Yuni, Eji, Wisti, tanpa terkecuali terimah kasih atas semuanya semoga keiklasan, kebaikan senantiasa bersama kalian dan Tuhan selalu memberikan kita kemudahan dalam menjalani hidup ini. **I Love You Plan010gi 2010**

7. Ucapan Terimah kasih yang sebesar-besarnya Kepada Kakanda **Ariyanto Achmad**, Kankanda **Tony**, **Kakanda Ivan**, **Kakanda Aziz**, **Kakanda Batir**, Kakanda **Bagaz**, Kakanda **Wyck**, Kakanda **Wandi**, Kakanda **Shodiq**, Kakanda **Appe**, yang telah mengajari dan memberikan pencerahan terhadap hakikat pengetahuan intelektual dan Spritual sehingga Penulis bisa mengenal dan menjadi insan yang lebih baik,
8. Terima Kasih buat Plano 07 Terksusnya Kakanda **Jay Blanco** Kakanda **Purta Alamsyah Jr**, Kakanda **Ibrahim Husni**, yang telah memberikan bantuan moril maupun materi yang di berikan pada penulis.
9. Terimah kasih buat saudara/saudariQ yang telah memberikan semangat buat penulis untuk merampungkan penulisan skripsi ini teruntuk **Arfain**, **Burhan**, **Haeril**, **Aziz**, **Amir**, **Juwilda**, **Kalasum**, **Yulyana**, **Rizka**, **Asrti**, semoga kita menjadi pejuang yang tanggu dalam meraih prestasi akademisi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENERIMAAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	i-v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Pembahasan	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Lahan	10
B. Pengertian Perubahan Pemanfaatan Lahan	11
C. Pengertian Perubahan Fungsi Lahan	12
D. Proses Perubahan Pemanfaatan Lahan	12
E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan	14
F. Perubahan Pemanfaatan Lahan	18
G. Konsep Pola Pemanfaatan Lahan	21
H. Kalasifikasi Penggunaan Lahan	24
I. Pertimbangan Penanganan Perubahan Pemanfaatan Lahan ...	24
J. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	27

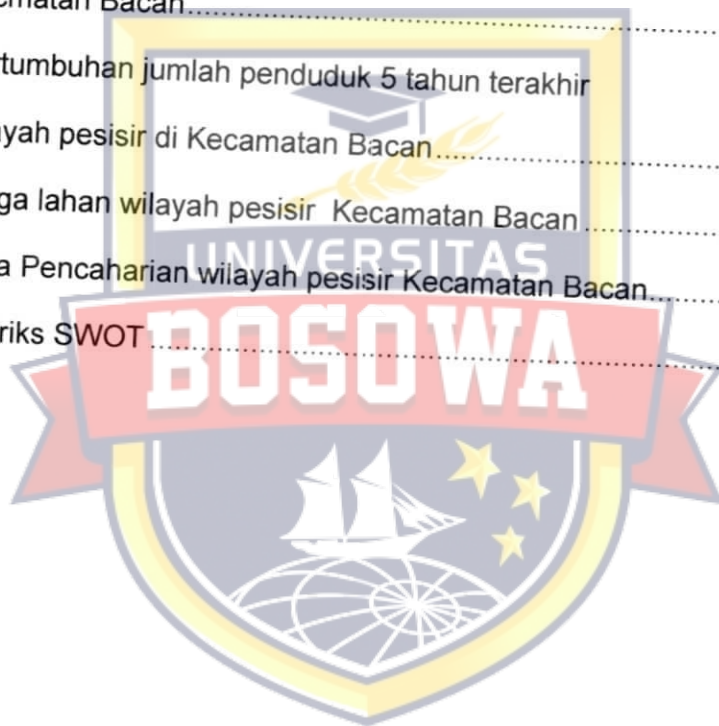
1. Klimatologi	70
2. Aspek Sosial Masyarakat	71
3. Aspek Kependudukan	72
4. Penggunaan Lahan 5 Tahun Terakhir	74
5. Sturuktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	81
A. Kondisi Sarana di Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan.....	83
B. Kondisi Jaringan atau Prasarana Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan	87
C. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halimahera Selatan Terhadap Kecamatan Bacan	89
a. Faktor –Faktor yang mempenagruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan.....	90
1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk	90
2. Harga Lahan.....	91
3. Mata Pencaharian	92
b. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan	92
1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk	92
2. Harga Lahan.....	94
3. Mata Pencaharian	96
c. Analisis Strategi Pengendalian Perubahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan	98
a. Analisis Faktor Internal	99
b. Analisis Faktor Eksternal	100
c. Formulasi Strategi	101
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Interprestasi Koefisien Korelasi.....	46
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013...	51
Tabel 4.2	Data Klimatologi Bulanan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013	53
Tabel 4.3	Luas Daerah Berdasarkan Tingkat Kelerengan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013	56
Tabel 4.4	Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013.....	62
Tabel 4.5	Distribusi Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013.....	64
Tabel 4.6	Luas Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2013	66
Tabel 4.7	Suhu Udara Rata – Rata, Maksimum dan Minimum Tahun 2013.....	70
Tabel 4.8	Perkembangan Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2009-2013.....	72
Tabel 4.9	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2013.....	73
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2013	74
Tabel 4.11	Jenis Penggunaan Lahan Dan Luas Lahan 5 Tahun Terakhir Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan.....	75
Tabel 4.12	Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2013	81

Tabel 4.13	Harga Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2009- 2013.....	83
Tabel 4.14	Jumlah Sarana Perdagangan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2013	84
Tabel 4.15	Jumlah sarana kesehatan wilayah pesisir Kecamatan Bacan.....	85
Tabel 4. 16	Jumlah sarana peribadatan wilayah pesisir Kecamatan Bacan.....	87
Tabel 4.17	Pertumbuhan jumlah penduduk 5 tahun terakhir wilayah pesisir di Kecamatan Bacan.....	93
Tabel 4.18	Harga lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan.....	95
Tabel.4.19	Mata Pencaharian wilayah pesisir Kecamatan Bacan.....	97
Tabel 4.20	Matriks SWOT.....	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Selatan	52
Gambar 4.2	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Halmahera Selatan	58
Gambar 4.3	Peta Pola Ruang	59
Gambar 4.4	Peta Administrasi Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan.....	67
Gambar 4.5	Peta Penggunaan lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2009	76
Gambar 4.6	Peta Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2010	77
Gambar 4.7	Peta Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2011	78
Gambar 4.8	Peta Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2012	79
Gambar 4.9	Peta Penggunaan lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2013	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan yang dilakukan di Indonesia selama ini terkonsentrasi di wilayah daratan semata. sehingga lambat laun wilayah daratan mengalami kejenuhan pembangunan. permintaan akan lahan yang selalu meningkat dihadapkan pada keterbatasan jumlah lahan ini merupakan suatu masalah yang harus dicari solusi. melihat kondisi wilayah pesisir mulai dilirik sebagai alternatif untuk dikembangkan. perubahan arah pembangunan ke wilayah pesisir merangsang terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi yang tentunya membutuhkan ruang untuk mewadahi kegiatannya, hal ini akan berpengaruh pada pola pemanfaatan lahan yang ada di wilayah pesisir tersebut. perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi yaitu tidak sesuai dengan peruntukannya dan melebihi daya dukung yang dimiliki lahan tersebut. hal ini membuat lahan tidak mampu menopang kegiatan tersebut pada akhirnya terjadi perubahan pemanfaatan lahan

Berbagai bentuk pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan pada saat ini, terutama pembangunan yang bersifat fisik tidak luput akan kebutuhan lahan. Pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan aktivitas manusia merupakan salah satu sebab terjadinya dinamika guna lahan disebabkan oleh faktor-faktor

yang saling berpengaruh antara lain pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya harga lahan dan mata pencaharian serta pemekaran atau perkembangan daerah terutama daerah perkotaan ke daerah pedesaan dan kebijaksanaan pusat maupun daerah.

Apalagi sekarang didukung dengan teknologi yang selalu ada inovasi-inovasi baru sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi berlangsung lebih cepat. pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi setiap waktu mengakibatkan kebutuhan ruang akan bertambah. disisi lain ruang sifatnya tetap dalam arti luas, namun dari sisi komposisi baik fisik, ekonomi dan sosial akan selalu berubah seiring dengan perubahan pemanfaatan lahan yang tidak memperhitungkan keseimbangan geobiofisik akan berakibat kepada kemubaziran dan dampak bencana alam yang akan terjadi.

Perkembangan suatu wilayah tentu akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan fisiknya. Suatu keniscayaan bahwa pembangunan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. oleh karena itu langka yang bisa di usahakan adalah berusaha untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan baik selama proses pembangunan maupun pasca pembangunan. untuk meminimalisir dampak negatif tersebut dapat dilakukan dengan menyiapkan suatu strategi rencana pembangunan yang berdasarkan produk tata ruang.

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan luas daratan 753,23 km² (9%) sedangkan wilayah lautan sebesar 7.373,32 km² (91%) secara geografis Kabupaten Halmahera Selatan termasuk Kabupaten kepulauan karena wilayahnya didominasi oleh lautan. wilayah daratan tersebar di pulau-pulau yang tergolong pulau kecil. ada tujuh pulau/kepulauan utama dengan luas masing-masing Pulau Obi (3.111 km²), Pulau Bacan (2.053 km²), Pulau Makian (113,12 km²), Pulau Kayoa (1142 km²), Pulau Kasiruta (708 km²), Pulau Mandioli (260 km²) dan semenanjung Pulau Halmahera yang masuk wilayah Kabupaten Halmahera Selatan seluas kurang lebih 2.615 km². Permukiman di Kabupaten Halmahera Selatan hampir semua terletak di wilayah pesisir. Dari 249 desa yang ada, hanya 4% desa yang tidak dikategorikan sebagai desa pantai, sedangkan 96% lainnya merupakan desa pantai. Keseluruhan desa tersebut berada pada lahan diketinggian kurang dari 500 meter dpl.

Perkembangan penduduk dan segala aktifitas akan membutuhkan kebutuhan penggunaan lahan yang membutuhkan alokasi pemanfaatan ruang untuk mewujudkan penggunaan lahan yang efisien, ekonomis dan seimbang. Untuk dapat mewujudkan pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya yang dapat berlangsung tanpa mengganggu pemanfaatan ruang yang berfungsi sebagai kawasan

lindung, maka wilayah pesisir Kecamatan Bacan perlu dikelola secara optimal melalui kegiatan penataan ruang.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pada tingkat wilayah pesisir Kecamatan Bacan diperlukan dokumen formal berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang bertujuan mengatur pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien. hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa setiap daerah Kabupaten perlu menyusun rencana tata ruangnya sebagai arahan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya rencana tata ruang ini disusun dengan perspektif menuju kondisi masa depan yang diharapkan yang serasi antara pemanfaatan ruang, penggunaan lahan yang dapat menunjang perkembangan penduduk, kegiatan ekonomi dan keserasian dan keseimbangan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dan aplikatif, serta memperhatikan keragaman wawasan setiap sektor yang terkait.

Wilayah pesisir Kecamatan Bacan dengan luas 20,2 (Ha) merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan yang mana turut merasakan adanya pengaruh perubahan pemanfaatan lahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pemanfaatan lahan yang terjadi di wilayah pesisir

Kecamatan Bacan telah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan yang mana perubahan pemanfaatan lahan tersebut diakibatkan oleh peningkatan pembangunan yang bersifat fisik (pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum maupun oleh peningkatan sosial ekonomi penduduk (permukiman, perdagangan, pendidikan dan tempat kegiatan atau usaha lainnya).

Perubahan tata guna lahan yang terjadi terdiri atas berubahnya lahan yang dahulu difungsikan sebagai kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industri, lahan kosong dan lain sebagainya menjadi kawasan terbangun yang terdiri atas peruntukan kawasan permukiman, perdagangan dan komersial, perkantoran dan jasa serta fasilitas sosial ekonomi lainnya. Perubahan tata guna lahan tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kota.

Untuk itu dalam upaya untuk mengetahui faktor apa yang dominan mempengaruhi terjadinya pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan dan bagaimana strategi pengendaliannya, maka diperlukan suatu kajian atau studi yang sifatnya komperhensif sehingga penulis perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor Apa yang dominan mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ?
2. Bagaimana Startegi Pengendalian pengaruh perubahan manfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selata ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi faktor apa yang dominan mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan
- b. Untuk Menetapkan Strategi Pengendalian pengaruh perubahan manfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang menguraikan tentang kajian teoritis tentang pengertian lahan, pengertian perubahan pemanfaatan lahan, pengertian perubahan fungsi lahan, proses perubahan pemanfaatan lahan, perubahan penggunaan lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, perubahan pemanfaatan lahan, konsep pola pemanfaatan lahan, klasifikasi penggunaan lahan, pertimbangan penanganan perubahan pemanfaatan lahan, pengendalian pemanfaatan ruang, perangkat perubahan pemanfaatan lahan, kebijakan pengembangan penggunaan lahan dalam undang-undang No 26 tahun 2007, definisi wilayah pesisir dan pantai, batasan pengertian wilayah pesisir di Indonesia, karakteristik wilayah pesisir dan kebijakan tata ruang wilayah pesisir

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari, Lokasi penelitian, definisi Operasional,

Jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, variable penelitian dan kerangka pikir.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang analisis dan pembahasan mengenai gambaran umum Kabupaten Halmahera Selatan dan juga tinjauan khusus Wilayah pesisir Kecamatan Bacan meliputi Desa/Kelurahan Amasing Kota, Desa/Kelurahan Amasing Kota Barat dan Desa/Kelurahan Labuha dan analisis tentang factor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan yakni faktor perkembangan jumlah penduduk, faktor harga lahan dan faktor mata pencaharian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang mana secara garis besar memaparkan secara ringkas dan jelas serta menarik kesimpulan dengan berdasar pada data-data yang telah dikelola.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lahan

Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan dan lain-lain. Haeruddin, (1999 : 6) dalam Samsir, (2000: 4).

Menurut Jayadinata, J.T, bahwa pengertian lahan berarti tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Misalnya dapat dikatakan : Tata guna lahan di kota. Sebagaimana disebutkan diatas dalam tata guna tanah, termasuk juga samudra dan laut serta daratan yang tidak dihuni (antartika) yang tidak ada pemilik perorangan atau lembaga, kalau pemiliknya adalah seluruh manusia.

Lahan menurut pengertian *Hoover*, mengartikan lahan sebagai ruang (space) yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, pengertian memandang lahan dari sudut ekonomi regional atau dari sudut pembangunan wilayah.

Lahan dan manusia merupakan sumberdaya yang paling besar, karena dari campur tangan manusialah lahan yang ada dapat

berubah/diubah fungsinya misalnya dari lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman atau kawasan industri.

B. Pengertian Perubahan Pemanfaatan Lahan

Dalam pembahasan ini perlu didefinisikan beberapa pengertian terkait dengan perubahan pemanfaatan lahan dan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkembangan sebuah kota.

Penggunaan lahan didefinisikan sebagai wujud kegiatan penguasaan tanah sebagai upaya untuk dapat memberi manfaat berupa hasil atau jasa tertentu, dan mewujudkan tata ruang serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan (Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum).

Perubahan pemanfaatan lahan pada dasarnya merupakan gejala yang normal sesuai dengan perkembangan dan pengembangan kota. Dari dua tipe yaitu Pertumbuhan dan Transformasi (*Doxiadis* dalam *Jurnal PWK* Vol 10 No 2, 1999). Pertumbuhan mencakup semua jenis permukiman baru, termasuk didalamnya permukiman yang sama sekali baru dan perluasan permukiman yang ada, jadi ada semacam perluasan dimana hanya terjadi dalam sekali. Sedangkan Transformasi adalah perubahan terus-menerus bagian-bagian permukiman perkotaan dan pedesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi bagi penghuninya.

C. Pengertian Perubahan Fungsi Lahan

Perubahan fungsi lahan atau pergeseran fungsi lahan adalah lahan yang mengalami peralihan pemanfaatan misalnya pertanian (kebun campuran ke peternakan) yang disebabkan oleh perubahan pola pemanfaatan lahan, faktor lain yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana terhadap perkembangan kawasan.

D. Proses Perubahan Pemanfaatan Lahan

Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana, merupakan gejala umum yang terjadi di kota-kota yang pesat pertumbuhannya. Perubahan pemanfaatan lahan dari peruntukan yang direncanakan umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasari arahan rencana dengan pertimbangan pelaku pasar

Disatu sisi, peruntukan lahan harus mempertimbangkan kepentingan umum serta ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku, sedangkan disisi lainnya kepentingan pasar dan dunia usaha mempunyai kekuatan yang tidak selalu dapat ditahan. Kedua faktor yang saling berlawanan ini diserasikan untuk memperoleh arahan pemanfaatan lahan yang optimal, yaitu yang dapat mengakomodasi kebutuhan pasar dengan meminimumkan dampak sampingan yang dapat merugikan kepentingan umum. Optimasi yang memuaskan semua pelaku yang terlibat tidak selalu dapat dicapai, dan ini juga

tidak selalu sama untuk kasus-kasus dan lokasi pemanfaatan lahan yang dihadapi.

Pengertian pemanfaatan atau dialih fungsi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sebidang lahan dari satu pemanfaatan ke pemanfaatan lainnya. Dalam kajian ekonomi lahan, pengertian ini sering dilokasikan pada proses dialih gunakan.

Khusus dalam dinamika perkembangan pusat kota, proses perubahan yang terjadi dibagi kedalam 7 tahap:

1. Proses Awal (*Inception*), yaitu nilai berkembangnya suatu kawasan sebagai calon pusat kota bersama-sama mulai berkembangnya suatu kota.
2. Ekslusi (*Eklusion*), yaitu terjadinya penonjolan nilai lahan tertinggi di pusat kota sehingga kawasan pusat kota menjadi eksklusif.
3. Proses Segresi, yaitu terjadinya pemisahan kawasan fungsional baru diluar kawasan pusat kota.
4. Proses Perluasan (*Ekstension*), yaitu terjadinya pemisahan kawasan pusat kota akibat bertambahnya jumlah kegiatan dan meluasnya jangkauan pelayanan.
5. Proses Peniruan dan Penyesuaian (*Replication and Readjustment*), yaitu munculnya fungsi serupa pusat kota, terutama pusat perbelanjaan dipinggiran kota akibat terjadinya

perluasan wilayah terbangun kota yang ada pada gilirannya menimbulkan penyesuaian di pusat kota lama.

6. Proses Peremajaan (*Redevelopment*), yaitu dilakukannya peremajaan pusat kota akibat adanya dinamika perubahan karakter maupun kegiatan di dalamnya.
7. Realisme Kota, yaitu terjadinya hubungan berjenjang disuatu kota, dimana pusat kota menjadi lokasi terpenting sementara kawasan-kawasan lainnya mengerutkan diri ke dalam jenjang yang lebih rendah.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan

Apabila melihat kecenderungan perkembangan sekarang ini, terlihat bahwa penggunaan lahan selalu dimulai dari wilayah yang lingkungan fisiknya paling baik. Setelah wilayah tersebut habis dimanfaatkan,.

Lebih lanjut dikatakan oleh Silalahi (1992:34) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap penggunaan lahan dapat disebutkan secara berurutan adalah faktor institusi hukum pertanahan, faktor fisik, faktor ekonomi dan faktor kependudukan. Berbeda yang dikemukakan oleh Barlowe bahwa faktor fisiklah yang merupakan faktor penentu utama yang paling berpengaruh terhadap perkembangan penggunaan lahan disamping faktor ekonomi dan penduduk. Penggunaan lahan juga di tentukan pula oleh keadaan

topografi, kemampuan dan kesesuaian lahan serta tekanan penduduk. Tanah yang subur lebih banyak digunakan untuk pertanian, biasanya berpenduduk padat Soerianegara. Sementara Sandy mengatakan bahwa penggunaan lahan semakin meningkat bersamaan terjadinya peningkatan jumlah penduduk.

Menurut Sitorus mengemukakan bahwa faktor sosial ekonomi akan menjadi lebih penting pada saat akan menentukan penggunaan lahan optimum. Faktor-faktor sosial ekonomi tersebut meliputi letak lahan dalam hubungannya dengan lokasi pasar, transportasi, pemukiman dan aktifitas manusia lainnya. disamping itu Pakpahan mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan penggunaan lahan.

Perubahan pemanfaatan lahan pada dasarnya merupakan gejala yang normal sesuai dengan proses perkembangan dan pengembangan kota. Dari dua tipe dasar pengembangan kota, yaitu pertumbuhan dan transformasi *Doxiadis*, yang berkaitan langsung dengan perubahan pemanfaatan lahan dalam konteks ini adalah tranformasi, Transformasi adalah perubahan terus menerus dengan pemukiman kota dan pedesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi bagi penghuninya *Doxiadis*. Transformasi adalah proses yang sangat normal karena merupakan bentuk pengembangan yang lebih

umum dibandingkan dengan perluasan. Perluasan hanya satu kali, sementara transformasi dapat terjadi berulang kali.

Selanjutnya Ibrahim Syahrul mengemukakan bahwa perubahan penggunaan lahan dapat diukur dengan menggunakan 3 kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Fungsi Lahan

Kriteria fungsi lahan berkaitan dengan jenis penggunaan lahan yang diarahkan oleh rencana kota. Perubahan penggunaan lahan dalam kriteria ini adalah perubahan dimana penggunaan lahan yang baru tidak sesuai dengan arahan penggunaan lahan berdasarkan rencana kota yang telah ditetapkan sebagai contoh apabila kegiatan perdagangan (atau kegiatan lain non pemukiman) dikembangkan pada lokasi yang direncanakan sebagai fungsi lahan pemukiman, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan perubahan penggunaan lahan kota.

2. kriteria Intensitas Penggunaan Lahan

Kriteria ini berkaitan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum dan/atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum yang diarahkan oleh rencana kota yang telah ditetapkan. Perubahan penggunaan lahan dalam kriteria ini adalah perubahan dimana penggunaan lahan yang baru melebihi KDB maksimum dan/atau KLB maksimum arahan rencana kota yang telah ditetapkan.

3. Kriteria Teknis Bangunan

Kriteria ini berkaitan dengan Garis Sepadan Bangunan (GSB) minimum yang diarahkan oleh rencana kota yang telah ditetapkan. Perubahan penggunaan lahan dalam kriteria ini adalah perubahan dimana penggunaan lahan yang baru memiliki GSB kurang dari GSB minimum yang diarahkan oleh rencana kota yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor lain yang berpengaruh kepada pembangunan pemukiman dan perumahan adalah yang disebabkan oleh perubahan nilai-nilai budaya masyarakat. Hal tersebut di kota-kota besar sebagai dampak dari proses perubahan masyarakat agraris ke masyarakat modern. Perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat di desa. Kecuali itu masyarakat pluralistis, nilai-nilai budayanya akan berbeda dengan perkembangan yang berbeda pula. Ditambah dengan pengaruh sosial-ekonomi yang tidak sama, masyarakat kota mempunyai ciri yang khas, yaitu bernilai budaya yang beraneka ragam.

Dari banyak pendapat, faktor yang berpengaruh dalam pembangunan pemukiman diantaranya kondisi sosial-ekonomi, peningkatan kesejahteraan, jumlah penduduk, mata pencaharian, harga lahan, kebijakan pemerintah dan peningkatan pendidikan. Selain itu faktor lain yang berpengaruh saat ini adalah diantaranya masalah kependudukan, pertanahan, keterjangkauan daya beli

masyarakat, perkembangan teknologi dan lain-lain. Disamping adanya perubahan nilai-nilai budaya masyarakat.

F. Perubahan Pemanfaatan Lahan

Menurut Kaiser (Zulkaidi, 1999:133) Secara substansi dalam penanganan perubahan pemanfaatan lahan yaitu perencana harus berurusan dengan tiga jenis nilai lahan yang amat kuat yaitu: Nilai sosial, Nilai pasar(ekonomi) dan nilai Ekologi(fisik) Nilai sosial lahan memandang pemanfaatan lahan sebagai fasilitator pola kegiatan dan aspirasi sosial yang di inginkan sedangkan nilai pasar memandang pemanfaatan lahan sebagai media keuntungan real estate kemudian nilai ekologi memandang pemanfaatan lahan sebagai ancaman potensial terhadap lingkungan yang harus di kurangi.

Perubahan fungsi lahan atau pergeseran fungsi lahan adalah lahan yang mengalami peralihan pemanfaatan misalnya pertanian (kebun campur ke peternakan) yang disebabkan oleh perubahan pola pemanfaatan lahan, faktor lain yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana terhadap perkembangan kawasan, (Gunawan.1986 dalam Samsir, 2000:8)

Haerudin (1997:14) mengemukakan masalah lahan di Indonesia, yaitu:

- a. Terjadinya kemunduran produktifitas yang tidak disertai usaha konversi lahan.

- b. Terjadinya kemunduran produktifitas lahan sebagai akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan kemampuan.
- c. Terdesaknya lahan pertanian yang relatif subur oleh jenis penggunaan lahan non pertanian di daerah perkotaan.

Perubahan fungsi lahan adalah lahan yang mengalami alih fungsi, baik dari pertanian, non pertanian hutan menjadi pertanian, jasa sebaliknya Haerudin, (1997:6)

Dari sisi dampak negatifnya, perubahan pemanfaatan lahan seringkali menimbulkan konflik antar pihak yang berkepentingan, yaitu antara investor, masyarakat dan pemerintah, antara lain berupa perijinan, ketidaknyamanan yang ditimbulkan, penyimpangan kebijakan, dan lain-lain. Masyarakat umum adalah yang paling sering menderita dampak negatif suatu perubahan fungsi lahan perkotaan. Seperti kemacetan lalu lintas, berkurangnya kenyamanan dan privasi (Zulkaidi, 1991).

Dilihat dari sisi positifnya selain bisa mengurangi beban pusat kota (dalam menampung aktivitas), banyak perubahan pemanfaatan lahan yang menguntungkan dari segi pengembangan kota dan peningkatan pendapatan daerah (Winarso dalam Safariah, 1999).

Mengutip penjelasan Bourne (1982:95), bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penggunaan lahan, yaitu: perluasan batas kota; peremajaan di pusat kota; perluasan jaringan infrastruktur terutama jaringan transportasi; serta tumbuh dan

Sebagai contoh dari keterkaitan tersebut yakni keunikan sifat lahan akan mendorong pergeseran aktifitas penduduk perkotaan ke lahan yang terletak di pinggiran kota yang mulai berkembang, tidak hanya sebagai barang produksi tetapi juga sebagai investasi terutama pada lahan-lahan yang mempunyai prospek akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya menurut Bintarto (1989:73) dari

lahan. sehingga dapat dianggap sebagai siklus perubahan penggunaan aktifitas dan lokasi, dimana hubungan ketiganya sangat berkaitan, perencanaan penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh manusia, Anthony J. Catanese (1986:317) mengatakan bahwa dalam kelinggian lahan:

- a. Faktor manusia, yang terdiri dari: kebutuhan manusia akan tempat tinggal, potensi manusia, finansial, sosial budaya serta teknologi.
 - b. Faktor fisik kota, meliputi pusat kegiatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan kota dan jaringan transportasi sebagai aksesibilitas kemudahan pencapaian.
 - c. Faktor bentang alam yang berupa kemiringan lereng dan
- dan natural terhadap alam, dan dipengaruhi oleh:

perkembangan dan perubahan pola tata guna lahan pada kawasan permukiman dan perkotaan berjalan dan berkembang secara dinamis hilangnya pemusatan aktifitas tertentu. Secara keseluruhan

hubungan yang dinamis ini timbul suatu bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan struktur penggunaan lahan melalui proses perubahan penggunaan lahan kota, meliputi:

- a. Perubahan perkembangan (*development change*), yaitu perubahan yang terjadi setempat dengan tidak perlu mengadakan perpindahan, mengingat masih adanya ruang, fasilitas dan sumber-sumber setempat.
- b. Perubahan lokasi (*locational change*), yaitu perubahan yang terjadi pada suatu tempat yang mengakibatkan gejala perpindahan suatu bentuk aktivitas atau perpindahan sejumlah penduduk ke daerah lain karena daerah asal tidak mampu mengatasi masalah yang timbul dengan sumber dan swadaya yang ada
- c. Perubahan tata laku (*behavioral change*), yakni perubahan tata laku penduduk dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam hal restrukturisasi pola aktifitas.

G. Konsep Pola Pemanfaatan Lahan

Menurut Arsyad (1989), penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan kedalam dua

katagori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk didalamnya lahan-lahan untuk perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapangan untuk rekreasi dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan (puskesmas/pustu) dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dengan pemukiman.

Menurut Martono (1997), perencanaan penggunaan lahan dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan yang paling sesuai terhadap daya dukung lahan agar produktifitasnya tinggi (optimal) tetapi tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Menurut Silalahi (1992) dalam usaha mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai pola pemanfaatan lahan suatu daerah, langkah pertama yang harus di tempuh ialah mengadakan penyederhanaan sebutan dari jenis-jenis pemanfaatan lahan yang beraneka ragam itu dengan menyebut klasifikasi penggunaan lahan secara sistematis.

Sitorus (1986) istilah klasifikasi lahan telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang studi. Oleh karena itu istilah tersebut mempunyai beberapa perbedaan dalam pengertiannya. Klasifikasi lahan didefinisikan sebagai pengaturan-pengaturan satuan lahan kedalam berbagai katagori berdasar sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan.

Vink (1986) Overlay peta dapat dilakukan secara manual (overlay manual), maupun dengan cara digital (overlay GIS). dikatakan bahwa dalam pola penggunaan lahan seperti halnya

mendeteksi perubahan pemanfaatan lahan, dua metode ini dapat digunakan. Pada metode interpretasi manual dan digital, tekanan diberikan pada perubahan penggunaan lahan dan perubahan-perubahan tersebut diversifikasi. Metode tersebut langsung diarahkan pada letak perubahan, sehingga hasilnya dapat diandalkan.

Menurut Nambo (1990) mengemukakan berbagai masalah yang dihadapi dalam penggunaan lahan di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini perlu segera diupayakan alternatif pemecahannya. Masalah penggunaan lahan di Indonesia yaitu: (1) Terjadinya kemunduran produktifitas yang tidak disertai usaha konservasi lahan; (2) Terjadinya produktifitas lahan sebagai akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya; (3) Terdesaknya lahan pertanian yang relatif subur oleh penggunaan lahan non pertanian utamanya di daerah perkotaan.

Menurut Sandy (1980) penggunaan lahan hendaknya dilandasi pada asas-asas sebagai berikut: penggunaan optimal, pola penggunaan lahan yang seimbang, manfaat lestari dimana telah termasuk prioritas kepada jenis-jenis penggunaan lahan yang biasa dialih gunakan dan langkah-langkah pengawasan lahan.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa para perencanaan harus mengambil langkah-langkah yaitu tahapan pertama perencanaan mengumpulkan data lahan selengkap mungkin baik dari segi fisik maupun hukum, tahapan kedua mengalokasikan lahan untuk berbagai

lahan sesuai dengan sasaran kebijakan pembangunan dan selanjutnya berusaha mengendalikan perkembangan penggunaan lahan.

Soemarto (1994) selanjutnya proses perubahan pola pemanfaatan lahan dapat diikuti dengan membandingkan potret udara atau citra satelit dari berbagai tahun, dari perbandingan itu dapat dilihat luas daerah pemukiman dan berkurangnya lahan pertanian

H. Klasifikasi Penggunaan Lahan

Informasi penggunaan lahan yang disajikan mengikuti klasifikasi penggunaan lahan yang ditetapkan surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional,. Secara garis besar klasifikasi penggunaan lahan tersebut di kelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu penggunaan lahan perkotaan (urban land use) dan penggunaan lahan non urban.

Penggunaan lahan urban meliputi perumahan, jasa (perkantoran, fasilitas umum) , perdagangan dan industri, sedangkan penggunaan lahan non urban meliputi areal persawahan, kebun campuran, tegalan, tambak, hutan, semak belukar, alang-alang dan padang rumput.

I. Pertimbangan Penanganan Perubahan Pemanfaatan Lahan

Dalam penanganan perubahan pemanfaatan lahan, campuran pemerintah ini sedikitnya adalah dalam perlindungan kepentingan masyarakat umum; pengaturan kegiatan sektor swasta

melalui kendali administratif, insentif dan disinsentif; serta faktor produksi (Zulkaidi; 1999:120).

Beberapa pertimbangan dalam penanganan perubahan pemanfaatan lahan dapat didasarkan pada prinsip di bawah ini:

1. Prioritas

Prioritas utama adalah untuk kepentingan umum. Semakin tinggi/luas skala kepentingan umum, maka semakin tinggi tingkat prioritasnya.

2. Penyembuhan (*Curative*)

Perubahan pemanfaatan lahan dianalogikan sebagai penyakit pada tubuh manusia. Salah satu upaya untuk memeperbaikinya adalah dengan metoda penyembuhan dan pembedahan. Salah satu contoh metoda tersebut adalah peremajaan kota (*urban renewal*). Namun, kadangkala saat penyembuhan dilaksanakan, penyakit yang ada telah mencapai tingkat yang sangat parah dan berbahaya sehingga sebaik apapun diagnosis persoalan kota, belum ada kota yang dinamis yang terselamatkan dengan metoda ini (Zulkaidi, 1999:121).

3. Pencegahan (*Preventive*)

Metoda ini memiliki prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Menurut Doxiadis (Zulkaidi, 1999:121), peanyembuhan memerlukan pengalaman dan kebijakan yang lebih tinggi, terutama kemampuan meramalkan dan melihat ke

depan. Terapi ini dapat mudah dilakukan bila laju pertumbuhan kota lambat, sehingga perencanaan seluruh kota relatif sederhana dan menampung perubahan yang normal seperti yang diharapkan. Metoda ini tidak akan berarti banyak bagi kawasan/kegiatan yang dinamis dan tingkat perubahannya sangat cepat.

4. Pengembangan (*Development*)

Metoda terapi yang paling logis adalah melalui pengembangan, karena selalu ada perlawanan dalam metoda penyembuhan dan terlalu sulit untuk melakukan pencegahan dalam pertumbuhan permukiman yang dinamis tanpa mengetahui arah perkembangannya (Zulkaidi; 1999:121). Jika kita dapat melihat arah perkembangan dan mengetahui terjadinya kesalahan, maka kita dapat mengarahkannya menuju tujuan yang tepat. Meskipun metoda ini paling tepat, tindakan terapi bisa mencakup metoda penyembuhan, pencegahan dan pengembangan sekaligus, yaitu sebagai berikut:

- Metoda penyembuhan dan pembedahan dapat diterapkan untuk persoalan yang sifatnya darurat dan segera
- Metoda pencegahan diperlukan untuk menghindari penyebaran persoalan atau tekanan pada bagian atau kawasan yang tidak tertulari tetapi mudah tertular

- Pengembangan merupakan satu-satunya metoda yang dapat menyelamatkan permukiman dalam jangka panjang, membuat metoda penyembuhan dan pembedahan tidak diperlukan, dan mengubah metoda preventive menjadi alat bantu saja.

J. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang menurut Undang-Undang RI No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Dalam Undang-Undang RI No. 26 tahun 2007 Pasal 35 dijelaskan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan Peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

K. Perangkat Pengendalian Perubahan Pemanfaatan Lahan

Berikut ini adalah beberapa bentuk contoh perangkat pengendalian perubahan pemanfaatan lahan, antara lain:

1. Mekanisme Perijinan

Mekanisme perijinan merupakan penerapan prinsip pencegahan. Kelemahannya adalah syarat yang diberikan tidak tegas dimanfaatkan untuk mengendalikan, dan seringkali sulit dipenuhi karena berada di luar kendali pengembang/investor. Contohnya,

syarat yang sulit dikendalikan pengembang adalah kemacetan lalu lintas di sekitar lahan usaha dan gangguan terhadap penduduk sekitar.

2. Pencabutan Perijinan

Berdasarkan pasal 37 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ijin pemanfaatan lahan ruang (tempat usaha, lokasi, mendirikan bangunan, dll) yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dapat dinyatakan batal (atau dicabut) oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Pencabutan ijin tersebut merupakan penerapan dari prinsip penyembuhan (*curative*). Tindakan yang lebih moderat adalah dengan menghentikan pembangunan untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dapat berupa pencabutan ijin atau bentuk penertiban lainnya yang lebih ringan.

3. Insentif dan Disinsentif

Bagi perubahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana, maka indeks biaya pembangunan dapat diperbesar agar menjadi faktor penghambat perubahan pemanfaatan lahan; sedangkan bagi perubahan pemanfaatan lahan yang didorong, maka indeks biaya pembangunan dapat diturunkan.

4. Perpajakan

Di samping pengenaan biaya pembangunan yang hanya dikenakan satu kali, sesungguhnya pengenaan disinsentif dapat pula dilakukan setiap tahun dalam bentuk pajak atau retribusi.



Saat ini, belum ada peraturan yang mendukung disinsentif ini. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebenarnya dapat menjadi dasar bagi pengenaan disinsentif ini, tetapi aturan PBB yang berlaku saat ini belum mempunyai komponen pengendalian di dalamnya karena dikenakan secara seragam berdasarkan komponen yang ditetapkan (Zulkaidi, 1999:123).

L. Kebijakan Pengembangan Penggunaan Lahan Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang, upaya pembangunan perlu ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang lebih baik agar seluruh pemikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara efektif dan efisien. Salah satu hal pokok yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan disegala bidang.

Sejalan dengan upaya penataan ruang tersebut, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan pada wilayah disusun Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan strategi pengembangan pola tata ruang yang memuat strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota.

Suatu kegiatan sistem penataan ruang, yang digariskan dalam UU. No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang ada, rentang waktu yang diberlakukan di RUTRK yang dijabakan kedalam tahapan

rencana 5 (lima) Tahunan dan dirinci lagi menjadi satu tahunan, khususnya untuk kawasan strategi yang diprioritaskan. Yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: Perencanaan, Pemanfaatan Ruang secara terperinci yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan, Peninjauan kembali merupakan upaya memperbaiki rencana agar rencan selalu digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Dalam pasal 55 dan 57 UU. No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang digaris petunjuk mengenai pengendalian/pengawasan penatan ruang Rencana Tata Ruang sebagai berikut: Bahwa pengendalian pemanfaatan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang; pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelapor, pemantauan dan evaluasi, penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M. Defenisi Wilayah Pesisir dan Pantai

Dengan melihat kondisi kekinian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, sebetulnya hingga saat ini pun masih belum ditemukan definisi yang pasti mengenai wilayah pesisir karena batas-batas yang ada bisa berubah sewaktu-waktu, namun ada beberapa definisi

berdasarkan keterangan dari ahli masa kini terkait definisi pesisir, sebagaimana yang akan dipaparkan dibawah ini ;

1. Wilayah pesisir merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut, dan intrusi air laut. Sedangkan batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan, seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Supriharyono, 2000).
2. Sedangkan menurut kesepakatan bersama dunia internasional, pesisir diartikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, apabila ditinjau dari garis pantai maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas sejajar garis pantai (*longshore*), dan batas tegak lurus pantai (*crossshore*), (Supriharyono, 2000).
3. UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

N. Batasan Pengertian Wilayah Pesisir di Indonesia

Sejalan dengan praktek penentuan wilayah pesisir yang dilakukan oleh beberapa negara di Asia, Amerika dan Eropa tersebut yang menggunakan pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administrative ataupun gabungan dari pendekatan-pendekatan tersebut (*multiple approach*), maka dalam penentuan wilayah pesisirnya, Indonesia juga menggunakan batasan pengertian berdasarkan pendekatan secara ekologis yang digabungkan dengan pendekatan dari segi perencanaan untuk memperlihatkan batasan secara yuridis dari wilayah pesisir Indonesia.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dengan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah pesisir yang landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai. Sebaliknya di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, wilayah pesisirnya akan sempit.

Pengertian pesisir juga bisa dijabarkan dari dua segi yang berlawanan, yakni dari segi daratan dan dari segi laut. Dari segi daratan, pesisir adalah wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat darat (seperti: angin darat, drainase air tawar dari sungai, sedimentasi). Sedangkan dari segi laut, pesisir adalah wilayah laut sampai wilayah darat yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti: pasang surut, salinitas, intrusi air laut ke wilayah daratan, angin laut).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Apabila ditinjau dari garis pantai (*coast line*), maka suatu wilayah pesisir memiliki 2 (dua) macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross shore*).

Ditinjau berdasarkan pendekatan secara administratif, masalah batasan pengertian wilayah pesisir merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu, karena akan

menunjukkan ruang lingkup berlakunya suatu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Di Indonesia, dalam konsep normatifnya batasan pengertian wilayah pesisir yang digunakan dalam Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu merupakan Wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/ kota.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir tersebut adalah : "Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut" Dengan demikian berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Indonesia menggunakan pendekatan secara ekologis yang menyatukan wilayah daratan dan lautan yang mempunyai keterkaitan secara ekologis, termasuk di dalamnya ekosistem pulau kecil dan perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil.

Kawasan pesisir memiliki kekayaan dan kebhinekaan sumberdaya alam. Pesisir pantai dan habitat (hutan bakau, estuari, daerah tambak, terumbu karang, rumput laut, delta dan lainnya) merupakan daerah yang produktif secara biologi tetapi mudah mengalami degradasi karena dampak ulah manusia atau karena

peristiwa alamiah. Kawasan pesisir telah mensupport sebagian besar penduduk dunia karena peranannya di bidang ekonomi dan budaya, kawasan pesisir diharapkan akan menampung pertumbuhan penduduk pada masa depan. Beban peningkatan jumlah penduduk mendorong peningkatan pembangunan yang membawa dampak peningkatan polusi, berkurangnya habitat (jenis ikan dan satwa), erosi pesisir/pantai, intrusi air asin/laut, dan dampaknya terhadap peningkatan permukaan laut.

Batas wilayah pesisir bagi perencanaan penataan ruang pesisir dan laut dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu ke arah darat dan ke arah laut, dengan berpedoman pada criteria ekologis, administrative dan perencanaan :

a. Batas kawasan pesisir dalam konteks penataan ruang

- 1) Batas laut untuk Rencana Tata Ruang Provinsi 12 mil, Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota 4 mil dan Rencana Detail Tata Ruang 4 mil.
- 2) Batas ke darat untuk wilayah pengaturan merupakan desa pantai dan untuk pengamatan wilayah DAS atau regional.
- 3) Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang daratan/laut sehingga perlu sinkronisasi.

b. Pengertian batasan pesisir ke arah darat

- 1) Ekologis, wilayah daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, instruksi air laut, arus, dan gelombang.
- 2) Administrative, batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitive secara arbitrer (2Km, 20Km dan seterusnya dari garis pantai).
- 3) Perencanaan sangat tergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi focus pengelolaan suatu wilayah pesisir, seperti pencemaran, intrusi air laut, dan lainnya.

c. Pengertian batasan pesisir ke arah laut

- 1) Faktor ekologis adalah wilayah laut yang masih dipengaruhi oleh proses alamiah yang terjadi di daratan (aliran air sungai, run off, aliran air tanah serta dampak pencemaran dan polusi akibat kegiatan manusia di daratan, serta wilayah laut yang masih menjadi bagian dari paparan benua (continental shelf).
- 2) Faktor administratif adalah jarak 4 mil, 12 mil, 200 mil (ZEE) dari garis pantai ke arah laut.
- 3) Perencanaan sangat tergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan suatu wilayah pesisir, seperti pengaruh pencemaran dan sedimentasi dari daratan serta adanya pengaruh dari ekologis mangrove.

O. Karakteristik Wilayah Pesisir

Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik wilayah pesisir akan diuraikan sebagaimana berikut :

1. Merupakan wilayah pertemuan antara berbagai aspek yang ada di darat, laut, dan udara. Bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari suatu proses penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur tersebut.
2. Berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) dan habitat dari berbagai jenis burung yang bermigrasi serta merupakan tempat pembesaran, pemijahan dan mencari makan berbagai jenis biota.
3. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada skala yang sempit akan dijumpai kondisi ekologis yang berlainan.
4. Memiliki tingkat kesuburan yang tinggi yang menjadi sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan di laut.

P. Kebijakan Tata Ruang Wilayah Pesisir

Menurut Soetomo (2005: 8) kebijakan umum dalam pengaturan wilayah pantai menyangkut kepada 3 aspek besar kebijakan: (1) kebijakan konservasi alam; (2) kebijakan untuk pemanfaatan pantai, dan (3) kebijakan untuk menghadapi bencana alam. Sedangkan kebijakan perencanaan wilayah pesisir sangat urgen untuk diaplikasikan pada 3 tipe kawasan pantai berikut ini :

1. Daerah konservasi pantai yang mempunyai pertimbangan nilai konservasi ekosistem yang tinggi (*high value natural conservation*) dan memiliki nilai lansekap (bentang alam) yang indah (*scenic landscape*).
2. Daerah yang sebagian dapat dikembangkan untuk kepentingan spesifik yang membutuhkan potensi pantai (misalnya, pelabuhan, fasilitas perikanan, pariwisata)
3. Daerah yang perlu dikendalikan karena proses perkembangan perkotaannya (urbanisasi)



BAB III

METODE PENELITIAN

Jika kita berbicara tentang metodologi maka hal yang tak kalah pentingnya adalah asumsi-asumsi yang melatar belakangi berbagai metode yang dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Asumsi-asumsi yang dimaksud adalah pendirian atau sikap yang akan dikembangkan di dalam kegiatan ilmiah. Sementara dalam sebuah penelitian ilmiah metode yang digunakan lebih kepada model penelitian secara Induksi yaitu penelitian yang dimulai dengan mengamati fenomena khusus untuk menyimpulkan yang umum/ mengamati kondisi lapangan dan kemudian melahirkan satu hipotesa.

Sebagaimana yang diungkapkan *Karl Raimund Popper* dalam teorinya bahwa, Cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan (observasi) secara teliti gejala (*simpton*) yang sedang diselidiki. Pengamatan yang berulang-ulang itu akan memperlihatkan adanya ciri-ciri umum yang dirumuskan menjadi hipotesa (dugaan sementara).

Selanjutnya hipotesa itu dikukuhkan dengan cara menemukan bukti-bukti empiris yang dapat mendukungnya. Hipotesa yang berhasil dibenarkan (justifikasi) akan berubah menjadi hukum. *K.R. Popper* juga mengatakan bahwa sebuah pernyataan itu dapat dibenarkan berdasarkan bukti-bukti pengamatan empiris.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kali ini berada di Kecamatan Bacan yang menjadi objek kajian adalah wilayah pesisir Kecamatan Bacan yang mana telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah daerah kabupaten Halmahera Selatan sebagai wilayah pesisir, dan yang termasuk dalam wilayah pesisir Kecamatan Bacan adalah, Desa Amasing Kota, Desa Amasing Kota Barat dan Desa Labuha

B. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang termasuk dalam lingkup kajian penelitian ini adalah:

- **Lahan** adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan bagi penggunaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan hektar (Ha).
- **Pemanfaatan lahan** adalah penggunaan lahan secara efektif sesuai dengan rencana peruntukannya maupun penataan kembali untuk mengubah ketidak efektifan lahan perentukan sebelumnya.
- **Perubahan pemanfaatan lahan** adalah perubahan penggunaan fungsi lahan yang terjadi akibat penggunaan fungsi lama yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan rencana tata ruang.
- **Penduduk** adalah orang yang tinggal di daerah tersebut atau kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang.

- **Mata pencaharian** adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang sebagai kegiatan sehari-hari guna pemenuhan kebutuhan kehidupan dan menjadi pokok pendapatan penghidupan baginya.
- **Harga lahan** adalah penjualan atau penawaran yang dilakukan sesuai dengan kondisi keberadaan dan harga jual di tempat tersebut.
- **Analisis** adalah Penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
- **Pengaruh** adalah akibat yang dilahirkan oleh suatu obyek kepada obyek lainnya (pengaruh aktifitas permukiman terhadap pola penggunaan lahan)
- **Perubahan pemanfaatan lahan** adalah lahan-lahan yang mengalami alih fungsi pemanfaatan lahan, baik dari pertanian ke non pertanian dan hutan menjadi pertanian dan sebaliknya.
- **Penggunaan lahan** adalah akumulasi dari berbagai jenis penggunaan lahan yang terstruktur di suatu kawasan atau wilayah. Menunjukkan pada kegiatan ekonomi dan sosial di atas lahan.
- **Pengendalian pemanfaatan Lahan** adalah kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan lahan

C. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan serangkaian informasi-informasi yang disajikan oleh sebuah objek yang didapat melalui pengamatan dan bersifat sementara. namun berkenaan dengan itu pembahasan mengenai data dapat dibagi atas beberapa apabila dilihat dari Jenis dan sumber sebuah data.

a. Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang membentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Data Kuantitatif

Sedangkan data Kuantitatif merupakan informasi yang diperoleh berkaitan dengan satuan-satuan angka yang memberikan keterangan berkenaan dengan jumlah seperti ; luas wilayah pesisir, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian serta data penunjang lainnya.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan tanpa ada perantara antara peneliti dengan objek yang akan diteliti. Seperti Kondisi eksisting tata guna lahan Kecamatan Bacan Kondisi eksisting Penggunaan Lahan wilayah pesisir penelitian pada aspek penggunaan lahan, kondisi social masyarakat.

2. Data Sekunder

Sangat berbeda dengan data primer, dimana data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung, artinya ada perantara antara peneliti dan objek yang akan diteliti, seperti :

- a. Instansi Pemerintahan
- b. Artikel
- c. Keterangan dari tokoh adat dan Masyarakat di sekitar wilayah pesisir Kecamatan Bacan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yakni seperti dijabarkan pada pembahasan berikut: :

– **Survey Lapangan**

Survey lapangan dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kondisi lapangan yang mana berkenaan dengan jumlah dari masing-masing objek yang akan diteliti. dengan menggunakan metode ini dapat diperoleh data mengenai, luas lahan, dan data lain yang sifatnya berupa angka-angka.

Adapun survey lapangan yang dilakukan di wilayah pesisir Kecamatan Bacan yakni: Mengukur luasan perubahan yang terdapat di wilayah pesisir Kecamatan Bacan

– **Survey Instansi**

Survey instansi ini dilakukan dengan cara mengambil data pada instansi yang terkait, guna mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif yang dapat mendukung penyelesaian penelitian ini.

Adapun data yang diperoleh dari instansi seperti BAPPEDA, BPS, Kantor Kecamatan yakni data demografi, data penggunaan lahan tahun 2009 sampai data penggunaan lahan tahun 2013

– **Observasi**

Observasi digunakan dengan melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang terdapat pada lokasi penelitian baik itu dari segi kondisi fisik, sosial budaya serta lingkungan yang terdapat pada lokasi penelitian, sehingga dengan demikian peneliti dapat melakukan hipotesa (dugaan sementara) berkenaan dengan informasi yang di dapat pada lokasi.

Adapun observasi yang dilakukan yakni: untuk mengamati jenis pemanfaatan lahan apa yang telah mengalami pengaruh perubahan di wilayah pesisir Kecamatan Bacan

– **Telaah pustaka**

Telaah pustaka adalah cara pengumpulan data dan informasi secara kualitatif dengan cara membaca literatur, laporan, brosur, majalah, bahan-bahan seminar dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama maka digunakan Analisis Korelasi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat atau semakin mendekati sempurna, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Adapun rumus analisis korelasi adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{N \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Dimana :

N = Jumlah perlakuan (pengambilan data)

X = variabel bebas

Y = variabel terikat/tetap

Untuk mengetahui besar hubungan variabel X dengan Y digunakan patokan interpretasi nilai persentase yang digunakan, yaitu:

Tabel 3.1
Interpretasi Koefisien Korelasi

Nilai IKH	Sebutan
0,80 – 1,00	Hubungan sangat kuat
0,60 – 0,79	Hubungan kuat
0,40 – 0,59	Hubungan sedang
0,20 – 0,39	Hubungan lemah
0,00 – 0,19	Hubungan sangat lemah

Sumber: Maria M.L 2000 dalam Arianti (2009:11)

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi korelasi bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas *Sig* sebagai berikut :

H_0 : Variabel X berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap variabel Y

H_1 : variabel X tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap variabel Y

2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua menggunakan Analisis Swot yaitu untuk menentukan strategi pengendalian perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan.

Analisis SWOT adalah salah satu teknik analisis untuk mengkaji wilayah dalam satu lingkungan secara keseluruhan. Untuk mengkaji suatu Strategi pengendalian pengaruh perubahan pemanfaatan lahan maka perlu di lakukan analisis dengan melihat factor internal (yang muncul dari dalam wilayah pengembangan) terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta factor eksternal (yang ada atau datang dari luar wilayah) terdiri dari peluang dan ancaman. Data yang di gunakan dalam analisis SWOT merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis sebelumnya.

F. Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu karakteristik yang memiliki dua atau lebih nilai atau sifat yang berdiri sendiri menurut Kerlinger ,1973 dalam Alimuddin Tuwu (2006:21) menyebut variabel sebagai konstruk atau sifat (properties) yang di teliti. Dalam penelitian ini variable di bagi menjadi dua menurut Alimuddin Tuwu (2006:22) yaitu variabel terikat dan variabel bebas dimana variabel terikat adalah hasil (obyek dari studi atau penelitian dan variable bebas adalah penyebab atau variabel yang dapat di manipulasi sesuai dengan keperluan penelitian

Gay, 1976 dalam Alimuddin Tuwu (2006:22). Pemilihan variabel tidak terlepas dari konsep teoritis yang telah di uji menurut kerlinger 1973 dalam Alimuddin Tuwu (2006:23) pemilihan variable yang tepat dapat berasal dari teori–teori yang telah ada sesuai dengan judul penelitian.

Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Variabel Terkait (Dependent) Variabel (Y) =
Penggunaan Lahan 2009-2013
2. Variabel Bebas (Independent) Variabel (X) terdiri dari:
 - a. Faktor Mata Pencaharian (Variabel bebas)
 - b. Faktor Kependudukan (Variabel bebas)
 - c. Harga Lahan (Variabel bebas)



G. Kerangka Pikir

Menurut Riduwan (2004:25) Kerangka berfikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Selatan

1. Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis Kabupaten Halmahera Selatan terletak antara $126^{\circ} 45'$ bujur timur dan $129^{\circ} 30'$ bujur timur dan $0^{\circ} 30'$ lintang utara dan $2^{\circ} 00'$ lintang utara dengan Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah $40.236,72 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari daratan seluas $8.779,32 \text{ Km}^2$ (22 %) dan luas lautan sebesar $31.484,40 \text{ Km}^2$ (78 %) Kabupaten Halmahera Selatan terletak di kawasan timur Indonesia, Namun apabila ditinjau dari segi administrasi berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah utara : Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate.
- ❖ Sebelah selatan : Laut Seram.
- ❖ Sebelah timur : Laut Halmahera.
- ❖ Sebelah barat : Laut Maluku.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2003 Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas 9 kecamatan. Seiring dengan tuntutan akan pemerataan pembangunan maka berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2007 Wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan dibagi menjadi 30 Kecamatan. wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dirinci tiap kecamatan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Obi Selatan	1083,48	12,34
2	Obi	1073,15	12,22
3	Obi Barat	95,53	1,08
4	Obi Timur	636,23	7,25
5	Obi Utara	160,69	1,83
6	Bacan	304,69	3,47
7	Mandioli Selatan	138,81	1,58
8	Mandioli Utara	96,79	1,10
9	Bacan Selatan	169,21	1,93
10	Kep. Batang Lomang	55,81	0,64
11	Bacan Timur	463,5	5,28
12	Bacan Timur Selatan	321,13	3,66
13	Bacan Timur Tengah	276,28	3,15
14	Bacan Barat	180,78	2,06
15	Kasiruta Barat	272,98	3,11
16	Kasiruta Timur	247,93	2,82
17	Bacan Barat Utara	264,94	3,02
18	Kayoa	87,62	1,00
19	Kayoa Barat	27,07	0,31
20	Kayoa Selatan	26,06	0,30
21	Kayoa Utara	39,22	0,45
22	Pulau Makian	55,5	0,63
23	Makian Barat	35,54	0,40
24	Gane Barat	493,67	5,62
25	Gane Barat Selatan	252,55	2,88
26	Gane Barat Utara	501,69	5,71
27	Kep. Jaronga	148,93	1,70
28	Gane Barat	656,72	7,84
29	Gane Timur Tengah	309,67	3,53
30	Gane Timur Selatan	304,15	3,46
Jumlah		8779,32	100,00

Sumber : Kabupaten Halmahera Selatan/ Dalam Angka Tahun 2014

Judul Gambar :

PETA ADMINISTRASI

Skala Peta : 1:1.000.000



Legenda

	Perairan		Sungai
			Canal
			Danau
			Batas Kabupaten
			Batas Kecamatan
			Jaringan Jalan
			Kecamatan
			Kec. Bacan
			Kec. Bacan Barat
			Kec. Bacan Barat Utara
			Kec. Bacan Selatan
			Kec. Bacan Timur
			Kec. Bacan Timur Selatan
			Kec. Bacan Timur Tengah
			Kec. Gane Barat
			Kec. Gane Barat Selatan
			Kec. Gane Barat Utara
			Kec. Gane Timur
			Kec. Gane Timur Selatan
			Kec. Gane Timur Tengah
			Kec. Kasiruta Barat
			Kec. Kasiruta Timur
			Kec. Koyoa
			Kec. Koyoa Barat
			Kec. Koyoa Selatan
			Kec. Koyoa Utara
			Kec. Kep. Jorong
			Kec. Kep. Batangbong
			Kec. Makian
			Kec. Makian Barat
			Kec. Mandoli Selatan
			Kec. Mandoli Utara
			Kec. Obi
			Kec. Obi Barat
			Kec. Obi Selatan
			Kec. Obi Timur
			Kec. Obi Utara

Dosen Pembimbing :

1. Ir. Rudi Latief, M.Si
2. Ir. Syamsuddin Margolang M.Si

Mahasiswa/Stambuk :

Humaldi Ahmad / 45 10 042 062

sumber Peta :

- RTRW Kab. Halmahera Selatan
- Peta RBI BAKOSURTANAL
- BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan
- Citra Landsat TM7 Tahun 2008

Inzet Peta



KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

2. Kondisi Klimatologi

Karakteristik iklim wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata antara 1.000 mm sampai dengan 2.000 mm. Curah hujan ini hampir merata di Pulau Bacan dan sekitarnya, Pulau Obi dan sekitarnya serta Halmahera Selatan. Selain itu Kabupaten Halmahera Selatan juga dipengaruhi oleh dua musim di antaranya Musim Utara pada bulan Oktober-Maret yang diselingi angin Barat dan Pancaroba pada bulan April dan Musim Selatan pada bulan September diselingi angin Timur dan Pancaroba pada bulan Oktober.

Menurut klasifikasi Schmidt F.H dan J.H.A Ferguson (1951), secara umum Kabupaten Halmahera Selatan beriklim Tipe A dan Tipe B kecuali Saket yang bertipe C. Menurut Klasifikasi Koppen (1960) Kabupaten Halmahera Selatan bertipe A kecuali Laiwui yang bertipe Am. Berdasarkan pengamatan stasiun meteorologi di Labuha, Halmahera Selatan didapat data klimatologi bulanan secara umum yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data Klimatologi Bulanan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013

Bulan Month	Temperatur / Temperature 0C			Tekanan Udara Rata-rata Atmospheric Pressure (Mib)	Lemban Nisbi Udara Averag e Relativ e Humidit y (%)	Angin / Wind		
	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimu m Minimum			Kecepat an Rata- rata Average Speed (Knot)	Kecepat an Terbesar Maximum Speed (Knot)	Arah Directio n
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)
Januari	26,6	31,4	23,2	1008.3	84	1	18	260
Februari	26.4	31,7	22.4	1008.1	81	2	22	300
Maret	26.3	31,3	23,2	1008.0	84	1	15	355
April	26.4	31,3	23,0	1009.6	83	1	10	270
Mei	26.3	31,3	23,3	1008,4	86	2	12	055
Juni	26.0	31,2	22,8	1009.5	86	1	12	045
Juli	25.7	30,3	22,6	1008,8	88	1	15	050
Agustus	25,2	29,6	22,6	1010.5	87	2	10	260
September	25.3	30,9	22,6	1010.2	82	3	15	255
Oktober	26.2	32.2	22,3	1009.9	81	2	11	275
November	26.0	31,1	22,9	1008.9	84	1	21	280
Desember	25,6	30,9	22,8	1007,9	85	1	14	220

Sumber : Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka, 2014

3. Topografi dan Hidrologi

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki daerah landai yang cukup luas. Dengan berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Halmahera Selatan Tidak Memiliki daerah yang berbukit. Adapun luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dengan berdasarkan pada kelerengan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Luas Daerah Berdasarkan Tingkat Kelerengan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013

No.	Kelerengan	Derajat Kemiringan	Luas (Km ²)
1	Datar	0-2 ⁰	4.615.55
2	Landai	2-8 ⁰	861.47
3	Miring	8-15 ⁰	1.420.33
4	Curam	15-40 ⁰	956.80
5	Sangat Curam	>40 ⁰	208,45

Sumber : Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka, 2014

Sedangkan kondisi hidrologi (kondisi air permukaan dan air tanah) Kabupaten Halmahera Selatan dipengaruhi oleh iklim, curah hujan serta keberadaan sungai dan danau. Keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah teridentifikasi hampir semua kecamatan yang berada pada kabupaten halmahera selatan. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki 151 DAS dan 5 buah danau (dengan 4 danau besar yang terdapat di Kec. Gane Timur, Kec. Bacan Timur dan Kec. Obi)

4. Geologi dan Jenis Tanah

Gambaran umum mengenai kondisi geologi dan jenis batuan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai komposisi yang sangat bervariasi, dimana terdiri dari batuan beku, *sediment* dan *metamorf*, karakteristik dan perebaran batumannya tertentu sesuai dengan daerah pembentukannya seperti: batuan beku di sebagian Pulau Makian sebagai hasil dari erupsi

Gunung Kie Besi, Batuan Sedimen di Pulau Kayoa, Batuan Residual di sebagian Pulau Obi serta Batuan *Skiss Metamorf* di sebagian Pulau Bacan dan sebagainya.

Tekstur tanah adalah perbandingan ukuran partikel-partikel kandungan tanah antara debu, tanah liat dan pasir dari satu contoh tanah. Tekstur berpengaruh langsung terhadap unsur hara, drainase dan kepekaan terhadap erosi. Juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan tanah dan pertumbuhan tanaman terutama dalam hal mengatur kandungan udara dalam rongga tanah, persediaan dan kecepatan peresapan air di daerah tersebut, dimana hal itu sangat berperan dalam mudah tidaknya lapisan tanah diolah. Definisi tekstur dapat diartikan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara Kualitatif, yaitu menggambarkan halus, sedang dan kasar sedangkan secara kuantitatif tekstur ini menggambarkan susunan relatif berat fraksi-fraksi yaitu pasir, debu dan tanah liat.

5. Pola Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam suatu perencanaan maupun pengembangan wilayah. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luas lahan sebesar 8.126,54 km². Berdasarkan data yang didapat dari hasil digitasi citra landsat tm7 tahun 2008 diketahui bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri Hutan, meliputi

hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder. Hutan lahan kering sekunder ini tersebar dan merupakan dominasi penggunaan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sedangkan hutan lahan kering primer hanya terdapat di Pulau Bacan (Kecamatan Bacan Barat Utara dan Bacan Timur) dan di Pulau Obi (Kecamatan Obi, Obi Utara, Obi Barat dan Obi Selatan). Pertanian yang terdiri dari pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering sekunder yang tersebar di seluruh wilayah dan pulau di Kabupaten Halmahera Selatan dengan persebaran di daerah pesisir pulau.

Kemudian Permukiman yang berkembang dan tersebar di pesisir pulau di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu Daerah Transmigrasi yang terdapat pada wilayah Kabupaten berada pada Kecamatan Bacan, Kecamatan Gane Barat Utara dan Gane Timur. Daerah tersebut dijadikan sebagai daerah transmigrasi dikarenakan wilayah tersebut masih memiliki aktivitas masyarakat yang cukup rendah dalam memanfaatkan wilayah tersebut. Disamping itu Kecamatan Gane Barat Utara dan Gane Timur memiliki daratan terbuka yang cukup luas. Sementara masyarakat setempat dalam memanfaatkan lahan yang ada masih sangat minim. Dengan luas yang terbesar diseluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan maka Kecamatan tersebut dijadikan sebagai

daerah transmigrasi. Kabupaten Halmahera Selatan dengan pola penggunaan lahan di antaranya, tanah terbuka yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, semak belukar yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, savana yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Rawa dengan luas terbesar di Kecamatan Gane Timur dan *Mangrove* yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun penyajian pola penggunaan lahan yang ada pada Kabupaten Halmahera dapat disajikan dalam Peta berikut ini.



Judul Gambar :
PETA PENGGUNAAN LAHAN

Skala Peta : 1:1.000.000



Legenda :

- Perairan**
 - Ikutkota Kabupaten
 - Ikutkota Kecamatan
 - Sungai
 - Garis Pantai
 - Danau
- Batas Administrasi**
 - Batas Propinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jaringan Jalan
- Penggunaan Lahan**
 - Awan
 - Hiutan Lahan Kering Primer
 - Hiutan Lahan Kering Sekunder
 - Hiutan Mangrove Primer
 - Hiutan Mangrove Sekunder
 - Pemukiman
 - Pertanian Lahan Kering
 - Pertanian Lahan Kering Bercampur
 - Sawana
 - Semak/Bekauar
 - Semak/Bekauar Rawa
 - Tanah terbuka
 - Transmigrasi
 - Rawa
 - Tubuh Air

Dosen Pembimbing :

1. Ir. Rudi Latief, M.Si
2. Ir. H. Syamsuddin Margolang, M.Si

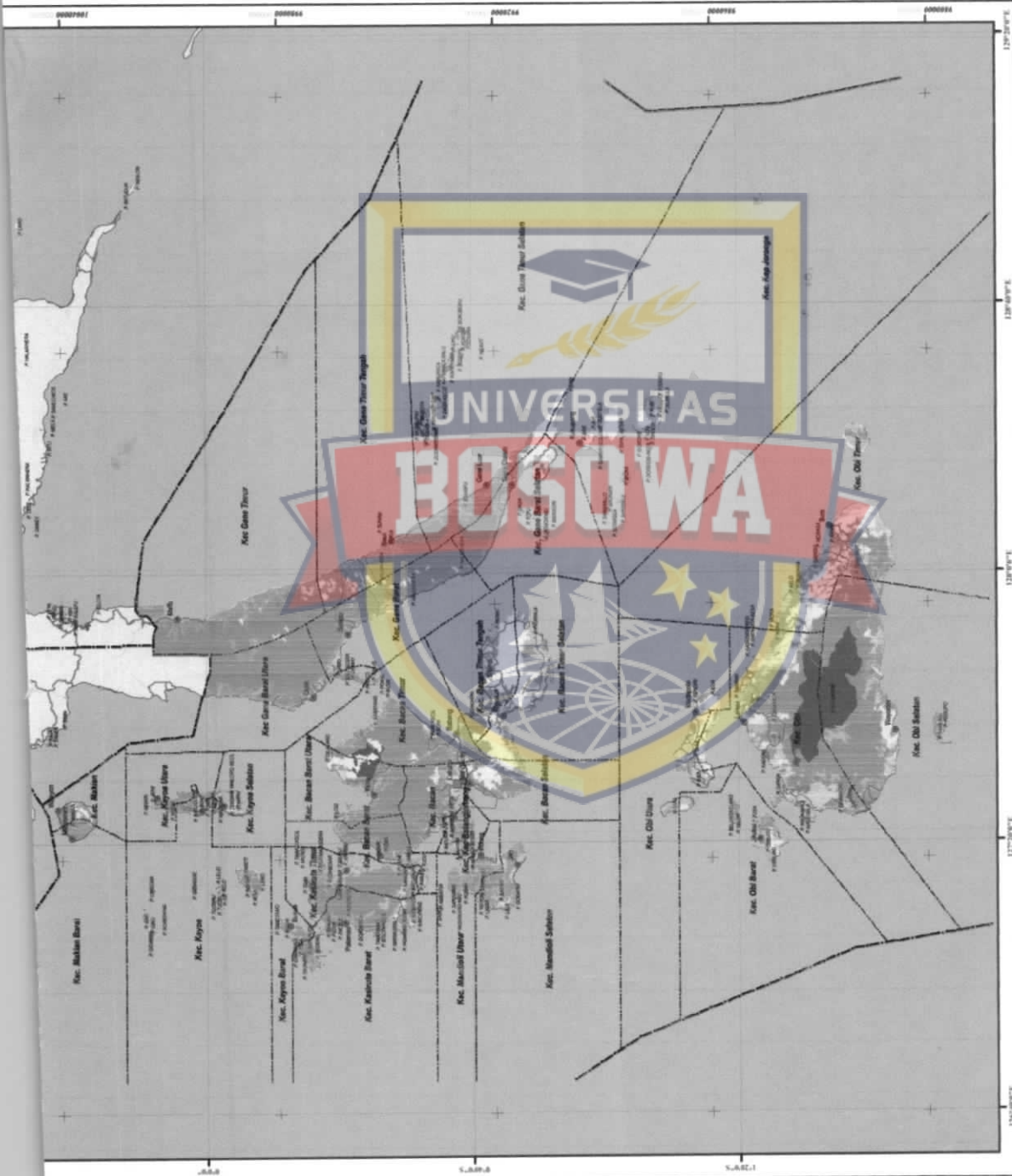
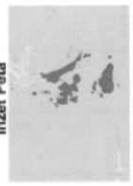
Mahasiswa/ Stambuk:

Humaidi Ahmad / 4510042062

Sumber Peta :

- RTRW Kab. Halmahera Selatan
- Peta RBI BAKOSURTANAL
- BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan
- Citra Landsat TM7 Tahun 2008

Inzet Peta



KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Judul Skripsi :
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENYARAFAN LAHAN WILAYAH PESISIR KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Judul Gambar :
PETA POLA RUANG

Skala :
1:250,000

Legenda :

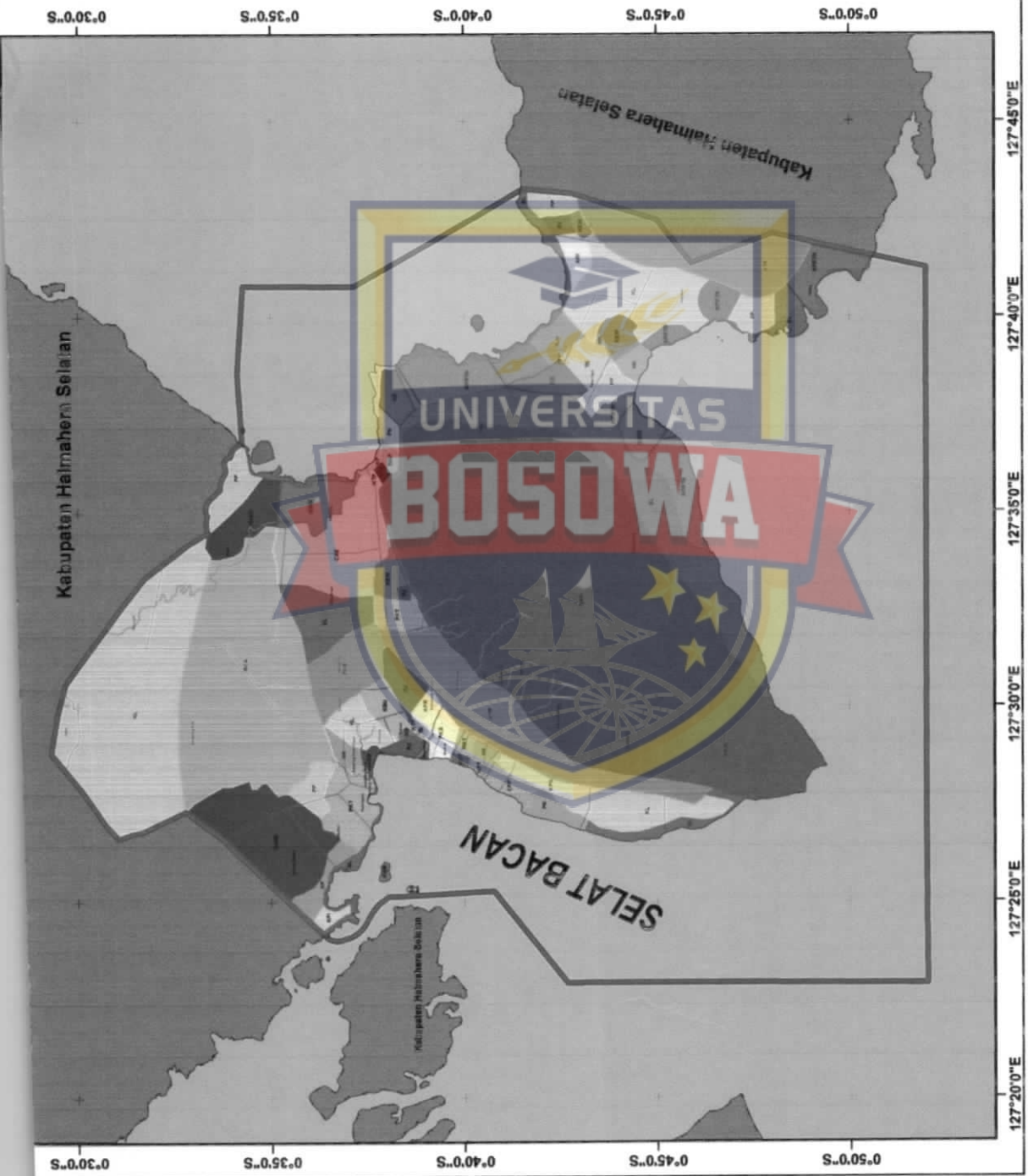
- Batas Kab. Halmahera Selatan
- Batas Kota Labuha
- Batas Desa
- Saluran
- Perumahan
- Cagar Budaya
- Lada

Dosen Pembimbing :
 1. Ir. Rudi Latief, M.Si
 2. Ir. Syamsuddin Margolang, M.Si

Mahasiswa/Stambuk :
 Humaidi Ahmad / 45 10 042 062

Sumber Peta :
 1. Peta Administrasi Kab. Halmahera Selatan
 2. Bappeda Kab. Halmahera Selatan
 3. RDTR Kec. Bacan Kota Labuha

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS BOSOWA 45 MAKASSAR
 2015**



6. Aspek Sosial Budaya

Kajian sosial dan budaya di Kabupaten Halmahera Selatan terbagi atas dinamika sosial masyarakat Halmahera Selatan dan dinamika budaya masyarakat Halmahera Selatan. Kajian sosial dan budaya tersebut didasarkan pada teori perubahan sosial dan kebudayaan berikut ini, yaitu:

- a. Versi Gilin-Gilin. Perubahan sosial dan kebudayaan adalah variasi cara hidup yang diterima karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya inovasi atau penemuan baru dalam masyarakat.
- b. Versi Selo Sumarjan. Perubahan sosial dan kebudayaan adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat.
- c. Versi Ogburn. Perubahan sosial dan kebudayaan adalah kondisi sosial primer yang menyebabkan perubahan, misalnya kondisi ekonomi, teknologi, geografi dan biologis.

Perubahan dalam masyarakat bukan semata-mata berarti suatu kemajuan (*progress*) namun dapat pula berarti kemunduran. Kajian atas kehidupan sosial masyarakat Halmahera Selatan akan lebih memfokuskan pada perubahan atau dinamika struktur sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam kajian sejarah Halmahera Selatan, terlihat bahwa masyarakat Halmahera Selatan sangat beragam. Beberapa hal yang mempengaruhi keberagaman atau pluralitas dari masyarakat Halmahera Selatan adalah:

- a. Perpindahan Kerajaan Bacan dari Makian ke Pulau Seki.
- b. Labuha menjadi salah satu bandar atau pusat pusat perdagangan di Maluku Utara pada abad XV dan XVI.
- c. Potensi sumber daya alam yang ada di Bacan mengundang investor dan berimplikasi pada banyaknya pendatang sebagai pekerja ataupun pedagang.

7. Aspek Kependudukan

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan adalah 206,873 jiwa dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 1,55 %. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4

**Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2013**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Obi Selatan	13661	13983	12128	12243	12379
2	Obi	11544	11815	14125	14540	14850
3	Obi Barat	4278	4379	3586	3637	3672
4	Obi Timur	2341	2396	3389	3424	3452
5	Obi Utara	7125	7293	8227	8340	8421
6	Bacan	14484	14825	19092	19991	20743
7	Mandioli Selatan	3782	3871	5798	5899	5958
8	Mandioli Utara	2970	3040	2990	3068	3124
9	Bacan Selatan	9002	9214	13265	13896	14288
10	Kep. Batang Lomang	6599	6754	6177	6265	6309
11	Bacan Timur	5721	5855	9051	9572	9830
12	Bacan Timur Selatan	6258	6406	4660	6591	6657
13	Bacan Timur Tengah	5694	5828	5229	5381	5472
14	Bacan Barat	6141	6286	3549	3609	3643
15	Kasiruta Barat	5008	5126	4521	4603	4652
16	Kasiruta Timur	2509	2568	3847	3936	3937
17	Bacan Barat Utara	4476	4581	4096	4196	4266
18	Kayoa	9580	9606	8180	8302	8365
19	Kayoa Barat	3728	3815	3469	5318	3542
20	Kayoa Selatan	6090	6234	5856	5905	5950
21	Kayoa Utara	3005	3075	2671	2727	2747
22	Pulau Makian	10828	11083	8977	9121	9201
23	Makian Barat	3866	3957	3417	3484	3526
24	Gane Barat	7496	7672	7972	8070	8110
25	Gane Barat Selatan	5431	5559	5545	5630	5675
26	Gane Barat Utara	6444	6595	6027	6110	6150
27	Kep. Jaronga	4350	4453	5264	5334	5366
28	Gane Barat	9410	9631	8729	8899	9005
29	Gane Timur Tengah	4498	4604	3796	3882	3940
30	Gane Timur Selatan	3916	4008	3478	5334	3565
Jumlah		190234	194712	198911	203707	206873

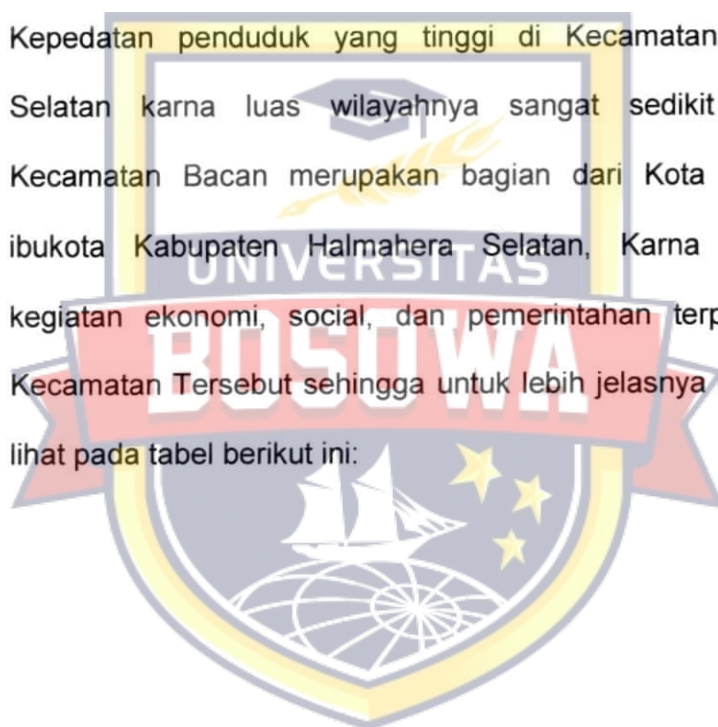
Sumber: Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka 2014

b. Distribusi Kepadatan Penduduk

Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas wilayah sekitar 8779,32 Km² dapat di ketahui distribusi penduduk di Kabupaten Halmahera selatan belum merata tahun 2013

kepadatan penduduk di ketahui bahwa kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kayoa Selatan yaitu sekitar 228 jiwa perkilometer persegi padahal luas wilayahnya hanya sekitar 0,30 persen saja dari Kabupaten Halmahera Selatan secara keseluruhan sedangkan Kecamatan Obi selatan yang mempunyai wilayah yang paling luas tingkat kepadatan penduduknya hanya sekitar 11 jiwa perkilometer persegi.

Kepedatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Kayoa Selatan karna luas wilayahnya sangat sedikit Tetapi Kecamatan Bacan merupakan bagian dari Kota Labuha ibukota Kabupaten Halmahera Selatan, Karna seluruh kegiatan ekonomi, social, dan pemerintahan terpusat di Kecamatan Tersebut sehingga untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.5
Distribusi Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Obi Selatan	1083,48	12379	11
2	Obi	1073,15	14850	14
3	Obi Barat	95,53	3672	39
4	Obi Timur	636,23	3452	5
5	Obi Utara	160,69	8421	52
6	Bacan	304,69	20743	68
7	Mandioli Selatan	138,81	5958	43
8	Mandioli Utara	96,79	3124	32
9	Bacan Selatan	169,21	14288	84
10	Kep. Batang Lomang	55,81	6309	113
11	Bacan Timur	463,5	9830	21
12	Bacan Timur Selatan	321,13	6657	21
13	Bacan Timur Tengah	276,28	5472	20
14	Bacan Barat	180,78	3643	20
15	Kasiruta Barat	272,98	4652	17
16	Kasiruta Timur	247,93	3937	16
17	Bacan Barat Utara	264,94	4266	16
18	Kayoa	87,62	8365	95
19	Kayoa Barat	27,07	3542	131
20	Kayoa Selatan	26,06	5950	228
21	Kayoa Utara	39,22	2747	70
22	Pulau Makian	55,5	9201	166
23	Makian Barat	35,54	3526	99
24	Gane Barat	493,67	8110	16
25	Gane Barat Selatan	252,55	5675	22
26	Gane Barat Utara	501,69	6150	12
27	Kep. Jaronga	148,93	5366	36
28	Gane Barat	656,72	9005	14
29	Gane Timur Tengah	309,67	3940	13
30	Gane Timur Selatan	304,15	3565	12
Jumlah		8779,32	206.873	24

Sumber : Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka 2014

B. Tinjauan Khusus Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan

Secara administratif wilayah pesisir mencakup tiga Desa/Kelurahan yang menjadi objek kajian di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yaitu : Desa/Kelurahan Amasing Kota Barat, Desa/Kelurahan Amasing Kota dan Desa/Kelurahan Labuha

1. Letak dan Batas Administrasi Wilayah Pesisir

Secara administratif wilayah pesisir Kecamatan Bacan termasuk pada wilayah Desa/Kelurahan Amasing Kota Barat, Desa/Kelurahan Amasing Kota dan Desa/Kelurahan Labuha dengan luas wilayah secara keseluruhan 20,2 Km² . Adapun batas secara administrasi yaitu :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa/Kelurahan Awanggao dan Amasing Kali
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa/Kelurahan Tomori dan Mandaong
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Makian dan Desa/Kelurahan Hidayat

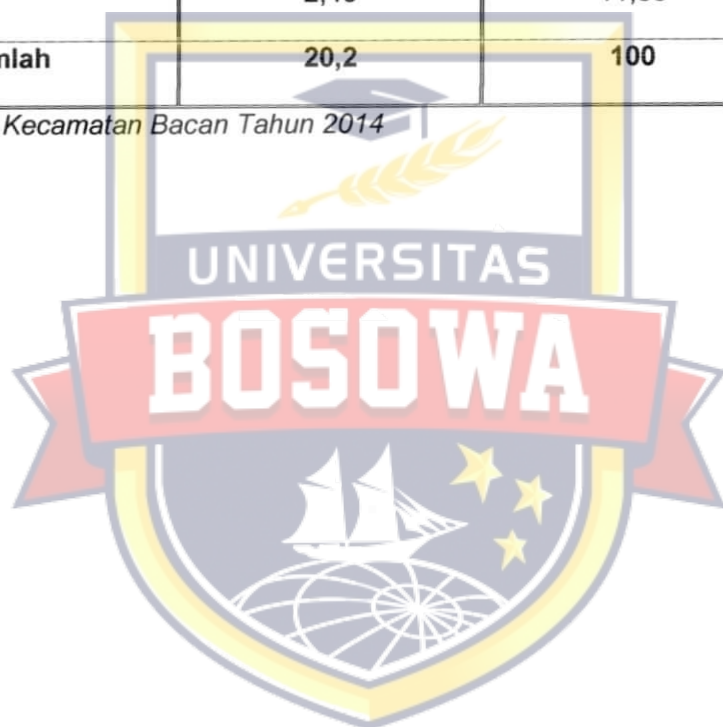
Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan secara geografis terletak pada pusat kota Kabupaten Halmahera Selatan dengan posisi bumi pada titik kordinat yang sebenarnya antara 127⁰29⁰30'BT dan 0⁰38⁰30'LS. Adapun luas wilayah Pesisir Kecamatan Bacan secara total sebesar 20,2 Km². Untuk lebih jelasnya mengenai

luas wilayah pesisir Kecamatan Bacan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Luas Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2013









No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Amasing Kota	16.20	80,19
2	Amasing Kota Barat	1,60	7.92
3	Labuha	2,40	11,88
Jumlah		20,2	100

Sumber: BPS Kecamatan Bacan Tahun 2014



Judul Gambar :
Administrasi Wilayah Pesisir

Keterangan Peta :

-  Batas Desa/Kelurahan
 -  Jalan
 -  Anak Sungai
 -  Selat Bacan
 -  Sungai
- Desa/Kelurahan**
-  Amasing Kota
 -  Amasing Kota Barat
 -  Labuha

Mahasiswa / Stambuk :
 Humaldi Ahmad / 45 10 042 062


Dosen Pembimbing :
 1. Ir. Rudi Latief M.Si
 2. Ir. Syamsuddin Margolang. M.Si

Skala Peta :
 1:20,000

Inzert Peta :



Kecamatan Bacan
 Halmahera Selatan
 Maluku
 Indonesia



Sumber Peta :

1. Peta Administrasi Kab. Halmahera Selatan
2. Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan
3. Google Earth

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
 2015




PETA WILAYAH PESISIR KECAMATAN BACAN

2. Geologi

Kondisi geologi (jenis batuan) di wilayah pesisir Kecamatan Bacan mempunyai komposisi yang sangat bervariasi. Dalam konteks geologi, wilayah pesisir Kecamatan Bacan sebagian besar terdiri dari jenis Batuan Gunung Api Neogen, Batuan Gunung Api Oligo Miosen, Alluvium, Komplek Malihan dan Sindemen Klasik Miose. Pengaruh terhadap pembangunan dengan kondisi geologi yang ada di wilayah pesisir Kecamatan Bacan mampu menunjang aktivitas dalam rangka meningkatkan arahan pemanfaatan ruang. Mengingat kondisi itu maka pembangunan tidak akan menjadi pengambat dalam pengembangan wilayah Kecamatan Bacan, Maka dapat dirincikan dengan luas dan persentase dapat di lihat pada table berikut :

3. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi di suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam perubahan pemanfaatan lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.

Kondisi topografi wilayah pesisir Kecamatan Bacan berada pada ketinggian 0-11 meter dari permukaan laut dan berada pada kisaran lereng 0-2%. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan

fisik tidak menemui kendala. Dalam pembangunan yang terjadi diusahakan untuk lebih menitikberatkan pemahaman kepada keselarasan antara lingkungan sekitar dengan pembangunan itu sendiri. Hal ini untuk lebih mewujudkan sesuatu yang tidak hanya dapat mewadahi aktivitas didalamnya tetapi juga dapat memberikan timbal balik yang positif terhadap alam.

4. Hidrologi

Berdasarkan hasil observasi lapangan, keadaan hidrologi di kawasan pesisir Kecamatan Bacan dibedakan antara lain air permukaan (sungai dan sebagainya) dan air yang bersumber di bawah permukaan (air tanah). Air di bawah permukaan yang merupakan air tanah merupakan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sumber air permukaan di ini bersumber dari sungai (Mandaong) yang melintasi lokasi penelitian, yang dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air hujan menuju laut atau berfungsi sebagai drainase primer. Sedangkan air bersih yang dimanfaatkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari bersumber dari air sumur dan air bor serta air PDAM yang disalurkan kerumah-rumah penduduk. Air di bawah permukaan yang merupakan air tanah merupakan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, sumur dangkal dapat diperoleh dengan tingkat kedalaman rata-rata mencapai 10 meter

5. Klimatologi

Suhu udara rata – rata harian (data tahun 2013) berkisar antara 81°C – 84°C. Kondisi suhu tertinggi hampir merata pada setiap bulannya, saat terjadi musim panas dan musim penghujan. Suhu terendah terjadi pada bulan Februari saat terjadi musim penghujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Suhu Udara Rata – Rata, Maksimum dan Minimum Tahun 2013

No	Bulan	Temperatur		
		Rata-rata	Maksimum	Minimum
1.	Januari	84	31,4	23,2
2.	Pebruari	81	31,7	22,4
3.	Maret	84	31,3	23,2
4.	April	83	31,3	23,0
5.	Mei	86	31,2	23,3
6.	Juni	86	30,3	22,8
7.	Juli	88	29,6	22,6
8.	Agustus	87	29,6	22,6
9.	September	82	30,9	22,6
10.	Oktober	81	32,2	22,3
11.	Nopember	84	31,2	22,8
12.	Desember	85	30,9	22,9

Sumber: Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka Tahun 2014

6. Aspek Sosial Masyarakat

Masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Bacan sebagian besar bekerja sebagai petani perkebunan dan nelayan, juga banyak yang bekerja di sektor wiraswasta, dan berstatus sebagai pegawai/karyawan pada instansi pemerintah dan swasta. Tetapi jika diamati secara dekat penduduk asli yang menempati wilayah pinggiran kota dan pantai hampir rata-rata sebagai petani perkebunan dan nelayan dengan tingkat pendidikan yang rendah. sehingga yang banyak menempati posisi sebagai pedagang, wiraswasta, karyawan/pegawai hampir didominasi oleh penduduk pendatang. Di sektor kegiatan perikanan laut, masih dikenal istilah "Punggawa" (pemodal) yang menyewakan perahu kepada nelayan-nelayan dengan sistem bagi hasil. Sehingga status "punggawa" sangat dihormati dan disegani oleh para nelayan sebagai tumpuan harapan bagi kehidupan mereka.

Masyarakat di wilayah pesisir hampir sebagian besar masih memiliki adat istiadat yang sampai sekarang tetap ditaati, seperti "adat istiadat saruma" di mana hampir seluruh anggota masyarakat memelihara kebersamaan dan kerukunan hidup beragama.

7. Aspek Kependudukan

a. Perkembangan Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir

Perkembangan jumlah penduduk yang ada di wilayah pesisir Kecamatan Bacan dalam kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami peningkatan yang tersebar di Desa/Kelurahan Amasing Kota , Amasing Kota Barat dan Desa/Kelurahan Labuha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8
Perkembangan Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir Wilayah Pesisir
Kecamatan Bacan Tahun 2009-2013

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Amasing Kota	3.225	3.550	3.194	3.297	3.369
2.	Amasing Kota Barat	1.550	1.660	1.552	1.629	1.338
3.	Labuha	5.120	5.290	5.526	5.792	6.077
Jumlah		9.895	10.500	10.272	10.718	10.784

Sumber: Kantor Kecamatan Bacan Dalam Angka 2014

b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Pada wilayah pesisir Kecamatan Bacan pada Tahun 2013 jumlah penduduk 10.784 jiwa dan kepadatan penduduk 5467 jiwa/Km yang tersebar di tiga Kelurahan yang berda di wilayah pesisir Kecamatan Bacan sedangkan jumlah penduduk yang

paling banyak tersebar adalah Desa/Kelurahan Labuha dengan jumlah penduduk 5792 jiwa dan jumlah penduduk terbesar kedua adalah pada Desa/Kelurahan Amasing Kota yaitu 3197 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah berada di Desa/Kelurahan Amasing Kota Barat dengan jumlah penduduk 1629 jiwa, Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Wilayah Pesisir
Kecamatan Bacan Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	Amasing Kota	16.20	3.197	2036
2	Amasing Kota Barat	1,60	1.629	1018
3	Labuha	2,40	5.792	2413
Jumlah		20,2	10618	5467

Sumber: Kecamatan Bacan Dalam Angka 2014

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin wilayah pesisir Kecamatan Bacan merupakan perbandingan yang memperlihatkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data statistik yang ada, dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk di wilayah pesisir Kecamatan Bacan terdiri dari laki-laki 5529 jiwa sedangkan

jumlah penduduk perempuan 5189 jiwa Lebih jelasnya akan diuraikan pada table sebagai berikut

Tabel 4.10
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Wilayah Pesisir
Kecamatan Bacan Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Amasing Kota	1660	1637	3297
2	Amasing Kota Barat	866	763	1629
3	Labuha	3003	2789	5792
Jumlah		5529	5189	10718

Sumber : Kecamatan Bacan Dalam Angka Tahun 2014

8. Penggunaan Lahan 5 Tahun Terakhir

Penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk akumulasi dari beberapa jenis penggunaan lahan yang terdapat di suatu wilayah Penggunaan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan pada tahun 2009 terdiri dari penggunaan lahan Hutan, kebun campuran, lahan terbuka, perdagangan, permukiman, peribadatan, pendidikan, Ruang terbuka hijau, serta penggunaan lahan lainnya. berdasarkan data statistic penggunaan lahan pada tahun 2013 Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan menunjukan bahwa jenis penggunaan lahan di dominasi oleh hutan dengan luas 170 Km² dan yang kedua permukiman dengan luas 111 Km² terkecil yaitu jenis penggunaan lahan ruang terbuka hijau yaitu dengan luasan 1 Km² untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut :

Tabel 4.11

**Jenis Penggunaan Lahan Dan Luas Lahan 5 Tahun Terakhir
Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Km ²)				
		Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Hutan	180	180	178	170	170
2	Kebun Campuran	35	35	32	30	30
3	Lahan Terbuka	11	11	10	5	5
4	Perdagangan	12	12	15	30	30
5	Permukiman	75	75	80	90	111
6	Peribadatan	1	1	1	1	1
7	Pendidikan	4	4	5	5	5
8	RTH	1	1	1	1	1
9	Terminal	1	1	1	1	1
10	Tanah Terbuka	2	2	2	1	1
11	Mangrove	1	1	1	1	1
12	Rawa-rawa	18	18	15	15	15
13	Sunagai	5	5	5	5	5
14	Perkantoran	1	1	1	1	1
Jumlah		347	347	347	356	377

Sumber: Kantor Kecamatan dalam Angka 2014

Judul Gambar :
Tata Guna Lahan Tahun 2009

Keterangan Peta :

Batas Desa/Kelurahan

Jalan

Anak Sungai

Selat Bacan

Jenis Guna Lahan

- | | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| | Hutan | | Perkantoran |
| | Kebun Campuran | | Permukiman |
| | Lahan terbuka | | Rawa-rawa |
| | Mangrove | | Sungai |
| | Pendidikan | | Tanah Terbuka |
| | Perdagangan | | Terminal |
| | Peribadatan | | RTH |

Mahasiswa / Stambuk :

Humaidi Ahmad / 45 10 042 062

Dosen Pembimbing :

1. Ir. Rudi Latief M.Si
2. Ir. Syamsuddin Margolang. M.Si

Skala Peta :

1:20,000



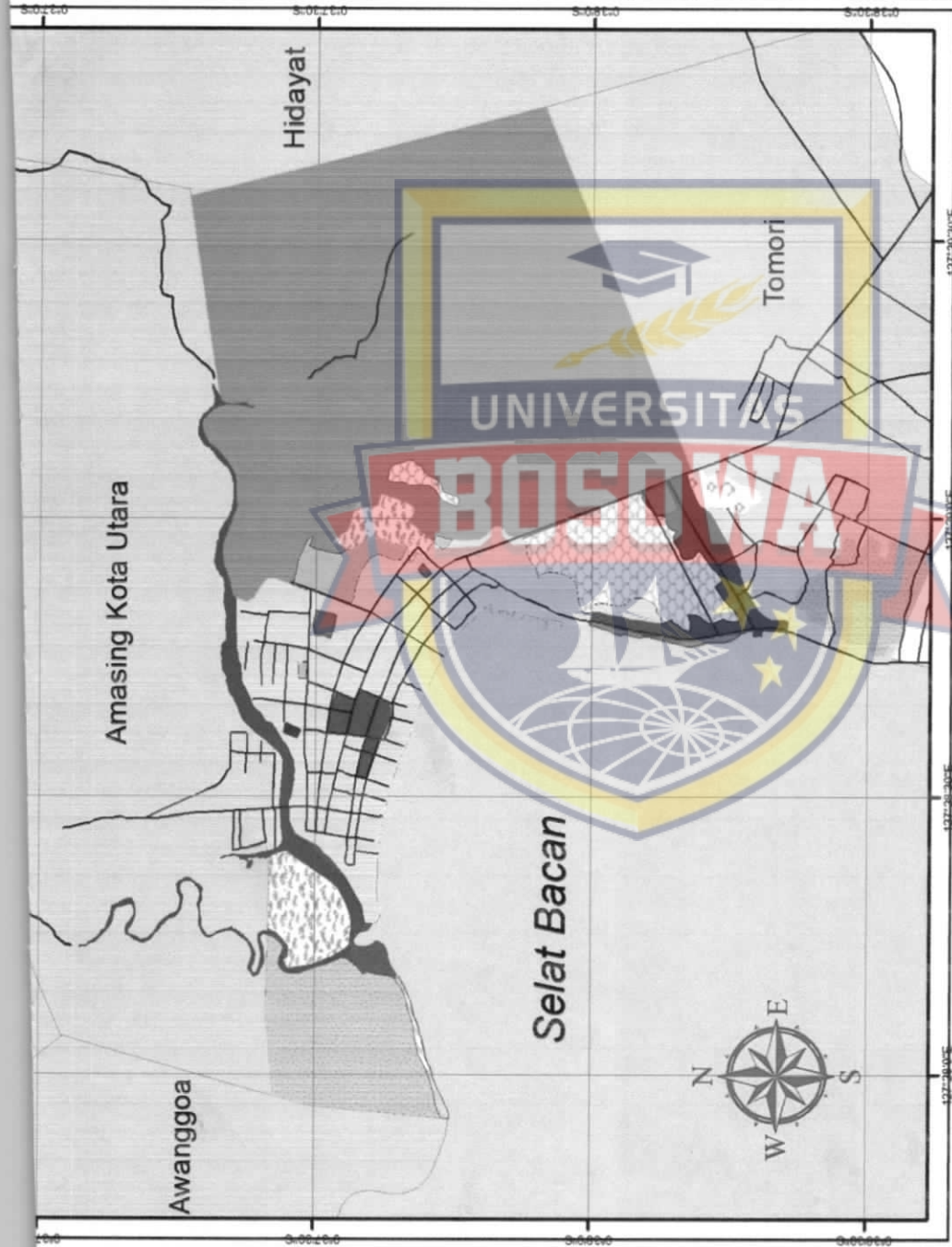
Inzert Peta :



Sumber Peta :

1. Peta Administrasi Kab. Halmahera Selatan
2. Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan
3. Google Earth

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2015



PETA WILAYAH PESISIR KECAMATAN BACAN

Judul Gambar :
Tata Guna Lahan Tahun 2010

Keterangan Peta :

Batas Desa/Kelurahan
Jalan
Anak Sungai
Selat Bacan

Jenis Guna Lahan

	Hutan		Perkantoran
	Kebun Campuran		Permukiman
	Mangrove		Rawa-rawa
	Pendidikan		Sungai
	Perdagangan		Tanah Terbuka
	Peribadatan		Terminal
			RTH

Mahasiswa / Stambuk :
Humaldi Ahmad / 45 10 042 062

Dosen Pembimbing :
1. Ir. Rudi Latief M.Si
2. Ir. Syamsuddin Margolang, M.Si

Skala Peta :
1:20.000

Inzert Peta :
Kecamatan Bacan
Wilayah Pesisir

Sumber Peta :

- Peta Administrasi Kab. Halmahera Selatan
- Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan
- Google Earth





JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2015

















PETA WILAYAH PESISIR KECAMATAN BACAN

Judul Gambar :
Tata Guna Lahan Tahun 2011

Keterangan Peta :

-  Batas Desa/Kelurahan
-  Jalan
-  Anak Sungai
-  Selat Bacan

Jenis Guna Lahan

-  Hutan
-  Kebun Campuran
-  Mangrove
-  Pendidikan
-  Perancangan
-  Peribadatan
-  Perkantoran
-  Permukiman
-  Rawa-rawa
-  Ruang Terbuka
-  Sungai
-  Tanah Terbuka
-  Terminal
-  RTH

Mahasiswa / Stambuk :
Humaidi Ahmad / 45 10 042 062

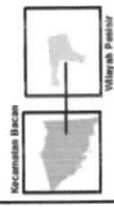
Dosen Pembimbing :

1. Ir. Rudi Latief M.Si
2. Ir. Syamsuddin Margolang. M.Si

Skala Peta :



Inzert Peta :



Sumber Peta :

1. Peta Administrasi Kab. Halmahera Selatan
2. Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan
3. Google Earth

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2015



PETA WILAYAH PESISIR KECAMATAN BACAN

Judul Gambar :
Tata Guna Lahan Tahun 2012

Keterangan Peta :

Batas Desa/Kelurahan

Jalan

Anak Sungai

Selat Bacan

Jenis Guna Lahan

- Hutan
- Perkantoran
- Kebun Campuran
- Permukiman
- Mangrove
- Rawa-rawa
- Pendidikan
- Sungai
- Perdagangan
- Tanah Terbuka
- Peribadatan
- Terminal
- RTH

Mahasiswa / Stambuk :

Humaidi Ahmad / 45 10 042 062

Dosen Pembimbing :

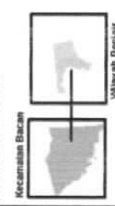
1. Ir. Rudi Latief M.Si
2. Ir. Syamsuddin Margolang. M.Si

Skala Peta :

1:20,000



Insert Peta :



Sumber Peta :

1. Peta Administrasi Kab. Halmahera Selatan
2. Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan
3. Google Earth

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2015



PETA WILAYAH PESISIR KECAMATAN BACAN

Judul Skripsi :

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN WILAYAH PESISIR KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Judul Gambar :

Tata Guna Lahan Tahun 2013

Keterangan Peta :

Batas Desa/Kelurahan

Jalan

Anak Sungai

Selat Bacan

Jenis Guna Lahan

Hutan

Kebun Campuran

Mangrove

Pendidikan

Perdagangan

Peribadatan

Perkantoran

Pemukiman

Rawa-rawa

Ruang Terbuka

Sungai

Tanah Terbuka

Terminal

RTH

Mahasiswa / Stambuk :

Humaldi Ahmad / 45 10 042 062

Dosen Pembimbing :

1. Ir. Rudi Latief M.Si

2. Ir. Syamsuddin Margoliang, M.Si

Skala Peta :

1:20.000

Inzert Peta :

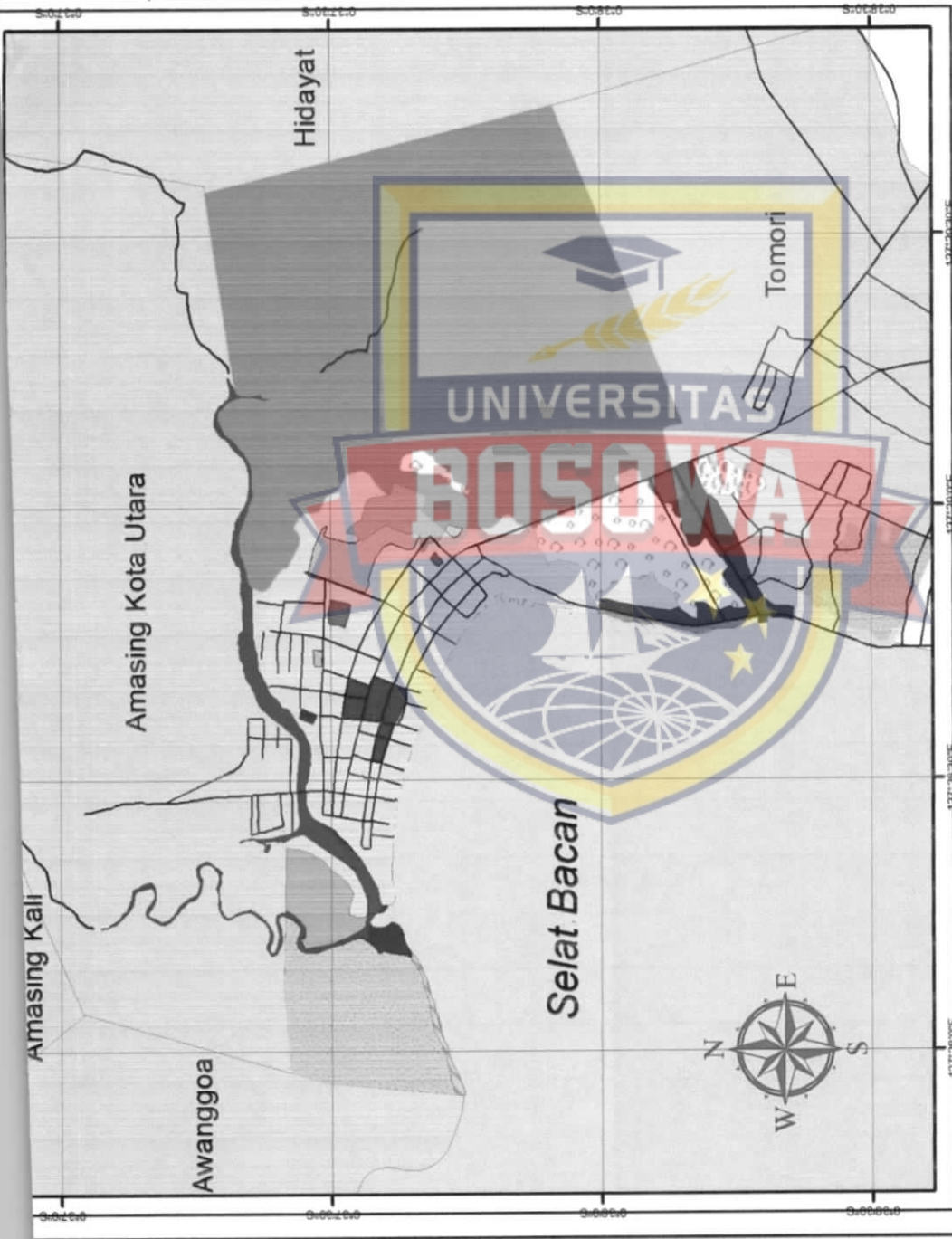
Kecamatan Bacan

Wilayah Pesisir

Sumber Peta :

1. Peta Administrasi Kab. Halmahera Selatan
2. Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan
3. Google Earth

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2015



PETA WILAYAH PESISIR KECAMATAN BACAN

9. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dengan adanya mata pencaharian masyarakat wilayah pesisir setempat dan merupakan salah satu aspek yang pasti akan mengalami perubahan maupun masalah yang muncul. Perubahan yang terjadi khususnya di wilayah studi dalam hal mata pencaharian umumnya dalam lima tahun pengamatan berdasarkan jumlah penduduk yang ada di wilayah pesisir Kecamatan Bacan yaitu, PNS, Nelayan, Petani, Pedagang dan Ankutan dan Lainnya yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya hal tersebut tidak lain disebabkan karena lahan yang sudah difungsikan sebagai pengembangan perdagangan dan pemukiman wilayah pesisir Kecamatan Bacan, Untuk itu dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.12
Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian Wilayah Pesisir
Kecamatan Bacan Tahun 2013

No	Jenis Mata Pencaharian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Petani	145	250	372	432	464
2	Nelayan	150	170	-	204	394
3	PNS	80	100	108	193	550
4	Kehutanan	15	15	-	-	50
5	Pedagang	100	155	267	226	237
6	Transportasi	108	167	155	170	200
7	Lainnya	165	200	475	-	340
Jumlah		763	1057	1377	1225	2235

Sumber : Kecamatan Bacan Dalam Angka 2014

10. Harga Lahan

Harga lahan/tanah dalam suatu lokasi bukan hanya ditentukan oleh hukum ekonomi yang berlaku yakni hukum permintaan dan penawaran dan juga bukan ditentukan oleh peruntukkan (zoning) dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibangun/disediakan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta yang berada pada lokasi tersebut.

Pada wilayah studi persediaan lahan bersifat tetap sedangkan permintaan terus bertambah dengan cepat. Pertambahan kebutuhan lahan tersebut disebabkan oleh adanya pertambahan penduduk dan berkembangnya berbagai macam pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh penduduk. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan yang mengarah pada harga dan nilai lahan serta terjadinya pengalihfungsian lahan.

Harga lahan dalam penelitian ini dapat dari dinas instansi terkait dan melalui wawancara langsung dengan masyarakat setempat, di mana di tentukan berdasarkan pada kedekatannya dengan jaringan jalan/kepadatan bangunan dan harga lahan yang dijual sendiri oleh masyarakat wilayah pesisir Kecamatan Bacan maupun . Dimana harga lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan dilihat berdasarkan Desa/Kelurahan (Rp/M), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Harga Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2009- 2013

No	Desa/Kelurahan	Harga Lahan (Rp/M)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Amasing Kota	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000
2	Amasing Kota Barat	50.000	100.000	100.000	200.000	200.000
3	Labuha	100.000	100.00	150.000	200.000	200.000

Sumber : Badan Aset dan Pertanahan Kabupaten halmahera Selatan 2014

C. Kondisi Sarana di Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan

Dalam rangka pembangunan dan peningkatan kualitas hidup manusia, maka ketersediaan akan sarana seperti fasilitas pendidikan, perdagangan, kesehatan, perkantoran, peribadatan dan sarana olahraga sangat diperlukan sebagai wujud daripada pemerataan pembangunan disegala aspek kehidupan, sehingga pada pembahasan ini akan diuraikan data-data mengenai sebaran sarana Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan.

a. Sarana Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memegang peranan penting dalam pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah pesisir Kecamatan Bacan. Namun keberadaan sarana tersebut sangat besar mendominasi wilayah pesisir Kecamatan Bacan perdagangan juga peranannya dalam mengurangi tingkat pengangguran dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. wilayah pesisir Kecamatan Bacan jenis sarana

perdagangan yang ada terdiri dari pertokoan dan pasar. Adapun jumlah sarana perdagangan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Jumlah Sarana Perdagangan di Wilayah Pesisir
Kecamatan Bacan Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan				
		Permanen/semi Permanen	Pasar Tidak Parmanen Kios	Mini Market	Kios	Toko Klontong
1.	Amasing Kota	-	1	-	36	67
2.	Amasing Kota Barat	-	-	-	15	10
3.	Labuha	1	-	3	53	240
Jumlah		1	1	3	104	317

Sumber: Kantor Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014

b. Sarana Pendidikan

Salah satu strategi dalam meningkatkan potensi sumberdaya manusia yaitu dengan melalui jenjang pendidik formal maupun noformal dimana pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh tersedianya sarana pendidikan. Dari data dan informasi baik melalui instansi yang terkait maupun survey lapangan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan terdapat fasilitas pendidikan seperti; Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat, Madrasah Tsanawiyah (MTS)/sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat, dan Sekolah Kejuruan serta Madrasah Aliyah (MA) .

c. Sarana Kesehatan

Dalam suatu wilayah keberadaan fasilitas kesehatan sangatlah penting guna menunjang kesehatan masyarakat. Adapun jenis fasilitas kesehatan yang terdapat di Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terdiri dari Rumah Sakit, Poliklinik, Praktek Dokter, Poskesmas, Pustu, Polindes dan Posyandu. Adapun jumlah jenis fasilitas kesehatan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15
Jumlah Sarana Kesehatan Wilayah Pesisir
Kecamatan Bacan Tahun 2013

Desa/Kelurahan	Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan						
	Rumah Sakit	Poliklinik	Praktek Dokter	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu
Amasing Kota	-	-	-	-	-	-	1
Amasing Kota Barat	-	1	-	-	-	-	1
Labuha	-	-	4	-	-	-	1
Jumlah	-	1	4	-	-	-	3

Sumber: Kantor Kecamatan Bacan Dalam Angka Tahun 2014

d. Sarana Permukiman

Pada dasarnya permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus ada dalam melangsungkan hidup dan penghidupan manusia. Sebagai kebutuhan hidup maka perlu juga ditunjang dengan adanya berbagai fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai obyek dan subyek pembangunan. Namun Kondisi Bangunan di sempadan pantai

hampir seluruhnya mempunyai kondisi buruk dengan Karakteristik permukiman yang berda di Kecamatan Bacan yaitu rumah parmanen dan semi parmanen suda dominan mengarah ke wilayah pesisir

e. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan salah satu sarana yang sangat penting terdapat di sebuah daerah atau wilayah karena sarana ini merupakan tempat ibadah umat manusia dalam mendekatkan diri kepada sang pencipta. Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi maupun survey lapangan jenis sarana peribadatan yang terdapat di wilayah pesisir Kecamatan Bacan terdiri dari Masjid, Surau/Mushollah dan Gereja Protestan dan Gereja Katolik. Adapun jumlah sarana peribadatan yang terdapat di Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan sebanyak 15 unit yang terdiri dari Masjid 8 unit dan Surau/Mushollah 4 unit, Gereja Protestan 2 Unit dan Gereja Khatolik 1 unit. Untuk lebih jelasnya banyaknya sarana peribadatan dirinci menurut wilayah pesisir Kecamatan Bacan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Jumlah Sarana Peribadatan Wilayah Pesisir
Kecamatan Bacan Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan Bacan			
		Mesjid	Surau/ Mushallah	Gereja Protestan	Gereja Katholik
1.	Amasing Kota	2	1	-	-
2.	Amasing Kota Barat	1	1	-	-
3.	Labuha	5	2	2	1
Jumlah		8	4	2	1

Sumber: Kantor Kecamatan Bacan Dalam Angka Tahun 2014

D. Kondisi Jaringan Atau Prasarana Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan

a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi yang menunjang kegiatan perekonomian, memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah kedaerah lainnya. Dari hasil pengamatan langsung di lapangan, jalan yang ada di wilayah pesisir Kecamatan Bacan ditinjau dari kondisi permukaan jalan dapat diklasifikasikan kedalam 3 (Tiga) jenis kondisi jalan, yaitu jalan aspal, pengerasan dan jalan tanah. Selain itu, pada jalan arteri dimana sebagian kondisi jalan sudah rusak walaupun sebelumnya merupakan jalan aspal, Pada umumnya untuk jenis jalan tanah dan pengerasan dapat ditemukan pada daerah-daerah pinggiran wilayah pesisir, Selain itu Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan terdapat banyak jaringan



jalan baru, dimana kondisinya berupa jalan tanah dan pengerasan.

b. Jaringan Drainase

Fungsi drainase sangat besar manfaatnya sebagai tempat mengalirnya air buangan rumah tangga ataupun air hujan, sehingga dapat mencegah terjadinya air genangan ataupun banjir. Berdasarkan hasil survey lapangan, jaringan drainase di wilayah pesisir Kecamatan Bacan tersebar di semua Desa/Kelurahan dan mengikuti jalan arteri, yaitu berupa drainase permanen dan sebagian masih dalam tahap pembangunan, sedangkan pada daerah pinggiran Pesisir Pantai sebagian besar jenis drainase berupa drainase alami. Jenis drainase yang ada yaitu berupa drainase primer dengan ukuran lebar atas 1 meter, lebar bawah 0,5 meter dan tinggi 0,5 meter, sedangkan drainase sekunder lebar atas 65 cm, lebar bawah 45 cm dan tinggi 45 cm, itupun sudah tersumbat oleh sampah disebabkan oleh tidak adanya pemeliharaan secara rutin. Dilihat dari topografi wilayah pesisir Kecamatan Bacan yang sangat datar, dimana potensial terjadinya genangan ataupun banjir, sehingga sistem drainase harus dibangun pada setiap jaringan jalan.

E. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Selatan Terhadap Kecamatan Bacan

Perencanaan atau pengembangan suatu wilayah tidak terlepas dari adanya Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Umum Tata Ruang wilayah bersangkutan. Hal ini dimaksud agar pembangunan yang dilaksanakan tidak terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih terhadap fungsi wilayah yang direncanakan. Di samping itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud untuk tercapai suatu kelancaran dalam hal pelaksanaan pembangunan untuk itu diperlukan suatu acuan yang dapat dipedomani dan menjadi pegangan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian jelas diperlukan adanya suatu strategi dan mekanisme pelaksanaan guna mengarahkan dan mengatasi berbagai aspek yang mungkin akan timbul.

Berdasarkan pembagian wilayah Kabupaten Halmahera Selatan menurut fungsi dominan dan fungsi penunjang ditetapkan beberapa kawasan strategi yang dapat diandalkan sebagai penunjang pengembangan dan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai fungsi dan peranan wilayah tersebut. Dengan demikian Kecamatan Bacan dalam perencanaannya ditempatkan sebagai daerah fungsi dominan/utama yaitu: pertanian, Perkebunan, Perikanan dan pariwisata sedangkan fungsi penunjangnya adalah transportasi darat, transportasi laut, ruang terbuka hijau dan pendidikan.

Kecamatan Bacan masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dimana diperuntukan sebagai wilayah yang mempunyai fungsi sebagai pusat-pusat permukiman dan perdagangan disamping itu juga di sebagai pusat pendidikan. Dari fungsi kawasan tersebut, maka seyogyanya tetap diperhatikan agar pembangunan yang berjalan tidak menimbulkan dampak terhadap penduduk sebagai objek dan subjek pembangunan wilayah pesisir Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan

1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk disuatu wilayah yang kian meningkat, akan sangat mempengaruhi pemanfaatan lahan dengan demikian maka yang terjadi di wilayah pesisir Kecamatan Bacan mengalami perkembangan jumlah penduduk yang dibarengi dengan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan ditiap tahunnya, yakni diantaranya pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kecamatan Bacan yang memiliki pemanfaatan lahan dan lingkup pelayanan yang berbeda dari sebelumnya.

Dengan dasar di atas tentunya dapat disimpulkan bahwa perkembangan penduduk memiliki keterkaitan yang erat dengan pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di

Kecamatan Bacan. Dengan demikian guna untuk menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan, perkembangan penduduk merupakan aspek yang perlu untuk dipertimbangkan agar dapat mencapai tujuan yang di harapkan.

2. Harga Lahan

Perubahan harga lahan sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan fisik, sosial dan ekonomi pada wilayah tersebut. Wilayah pesisir Kecamatan Bacan mengalami peningkatan harga lahan yang berkisar Rp. 50.000/m² s/d Rp. 100.000/m².

Dengan melihat perubahan harga lahan di atas, ini menunjukkan bahwa perkembangan pemanfaatan lahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, telah menunjukkan perubahan yang sangat signifikan di wilayah pesisir Kecamatan Bacan. Kebutuhan akan lahan untuk pembangunan berbagai macam jenis sarana dan prasarana perkotaan, akan semakin susah untuk di beli karena meningkatnya harga lahan pada wilayah tersebut. Tingkat persaingan akan penguasaan lahan akan semakin ketat, guna pembangunan perumahan dan berbagai jenis kegiatan investasi lainnya. Kondisi inilah yang kemudian memicu adanya pengaruh perubahan pemanfaatan lahan

3. Mata Pencaharian

Perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dengan adanya mata pencaharian masyarakat wilayah setempat dan merupakan salah satu aspek yang pasti akan mengalami perubahan maupun masalah yang muncul. Perubahan yang terjadi khususnya di wilayah studi dalam hal mata pencaharian umumnya dalam lima tahun pengamatan berdasarkan jumlah penduduk yang ada di wilayah pesisir Kecamatan Bacan maka nelayan, petani dan PNS, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya hal tersebut tidak lain disebabkan karena lahan yang sudah difungsikan sebagai pengembangan lapangan pekerjaan lainnya.

b. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan

1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Salah satu akibat dari perkembangan penduduk yang kian pesat dan tidak disertai dengan ketersediaan lahan yang cukup, maka akan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk yang tinggi. Tingkat kepadatan penduduk dipengaruhi oleh besaran jumlah penduduk yang mendiami wilayah tertentu serta luasan wilayah tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran pertumbuhan penduduk wilayah pesisir di Kecamatan Bacan yang kemudian berdampak pada pengaruh perubahan

pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Kecamatan Bacan
Semakin besar pertumbuhan penduduk pada kawasan tersebut
akan menimbulkan berbagai dinamika sosial serta
memperhambat aktifitas pembangunan.

Pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan
jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk
pada tahun sesudahnya. Berdasarkan hasil perhitungan didapat
rata-rata pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir Kecamatan
Bacan sebesar 10,43%, untuk lebih jelas mengenai
pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir diuraikan pada tabel
Sebagai berikut:

Tabel 4.17
Pertumbuhan Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir
wilayah pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2009-2013

Desa/Kelurahan	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	
	9.895	10.500	10.272	10.718	10.784	10,43
Perkembangan	-	605	446	446	66	
Persentase (%)	-	5,61	4,13	4,13	0,61	

Sumber: Hasil Perhitungan 2014

Berdasarkan perhitungan korelasi diperoleh hasil yang
menyatakan bahwa faktor pengaruh perkembangan jumlah
penduduk mempunyai nilai r_{hitung} sebesar $0,69 < r_{tabel}$ 0,87 pada

taraf kepercayaan 5% maupun pada taraf signifikansi 1% r^{tabel} 0,95 pada derajat bebas (Db) = 3

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor pengaruh perubahan pemanfaatan lahan dengan variabel perkembangan jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang tidak signifikan atau H_1 di terima di tolak H_0 antara faktor pengaruh perubahan pemanfaatan lahan berdasarkan variabel perkembangan jumlah penduduk.

Selanjutnya dari hasil koefisien kontingensi setelah adanya hasil uji hitungan korelasi didapatkan nilai indeks kuatnya hubungan (IKH) yaitu 0,69. Dari nilai indeks tersebut maka diidentifikasi bahwa memiliki pengaruh kuat (Lampiran 1)

2. Harga Lahan

Harga lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan berdasarkan data yang ada dihitung pertahunnya mengalami kenaikan Rp. 50.000 yang jumlahnya dirata-ratakan. Dengan melihat perubahan harga lahan ini menunjukkan bahwa perkembangan pemanfaatan lahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, telah menunjukkan perubahan yang sangat signifikan di wilayah pesisir Kecamatan Bacan. Kebutuhan akan lahan untuk pembangunan berbagai macam jenis sarana dan prasarana perkotaan, akan semakin susah untuk di beli karena meningkatnya harga lahan pada wilayah tersebut. Tingkat

persaingan akan penguasaan lahan akan semakin ketat, guna pembangunan perumahan dan berbagai jenis kegiatan investasi lainnya. Kondisi inilah yang kemudian memicu adanya ketimpangan pemanfaatan lahan, karena faktor keseimbangan pemanfaatan lahan bukanlah faktor yang diutamakan melainkan faktor bisnis untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan kelompok. Sebagaimana pada table sebagai berikut :

Tabel 4.18
Harga Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2009- 2013

No	Desa/Kelurahan	Harga Lahan (Rp/M)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Amasing Kota	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000
2	Amasing Kota Barat	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
3	Labuha	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000
Jumlah		100.000	100.000	150.000	175.000	250.000

Sumber : Hasil Perhitungan 2014

Berdasarkan perhitungan korelasi diperoleh hasil yang menyatakan bahwa faktor pengaruh perubahan pemanfaatan lahan dengan variabel harga lahan mempunyai nilai $r_{hitung} 0,93 > r_{tabel} 0,87$ pada taraf kepercayaan 5% sedangkan jika di uji dengan taraf signifikansi 1% maka nilai $r_{hitung} 0,93 < r_{tabel} 0,95$ pada derajat bebas (Db) = 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor pengaruh perubahan pemanfaatan lahan dengan variabel harga lahan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau H_0 di tolak atau diterima H_1 pada tingkat signifikansi 5%

Selanjutnya dari hasil koefisien kontingensi setelah adanya hasil uji hitungan korelasi didapatkan nilai indeks kuatnya hubungan (IKH) yaitu 0,93 dari nilai indeks tersebut maka diidentifikasi faktor pengaruh perubahan pemanfaatan lahan dengan variabel harga lahan mempunyai pengaruh yang sangat kuat. (Lampiran 2)

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian di wilayah pesisir Kecamatan Bacan dilihat dari jumlah penduduk yang ada mengalami peningkatan terutama sektor pertanian dan PNS. Sehingga condong masyarakat yang berada di Kecamatan Bacan hanya pengen jadi petani dan PNS untuk itu maka perlu dibuka lapangan pekerjaan yang bisa menjadikan masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Bacan tidak condong pada kedua sektor pekerjaan itu. Lebih jelas mengenai pengaruh mata pencaharian terhadap perubahan pemanfaatan lahan dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 4.19
Mata Pencaharian Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan Tahun 2013

No	Jenis Mata Pencaharian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Petani	145	250	372	432	464
2	Nelayan	150	170	-	204	394
3	PNS	80	100	108	193	550
4	Kehutanan	15	15	-	-	50
5	Pedagang	100	155	267	226	237
6	Transportasi	108	167	155	170	200
7	Lainnya	165	200	475	-	340
Jumlah		763	1057	1377	1225	2235

Sumber : Kecamatan Bacan Dalam Angka 2014

Berdasarkan perhitungan korelasi diperoleh hasil yang menyatakan bahwa faktor pengaruh mata pencaharian mempunyai nilai $r_{hitung} 0,90 > r_{tabel} 0,87$ pada taraf kepercayaan 5% sedangkan jika di uji dengan taraf signifikansi 1% maka nilai $r_{hitung} 0,90 < r_{tabel} 0,95$ pada derajat bebas (Db) = 3

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor pengaruh perubahan pemanfaatan lahan dengan variabel mata pencaharian mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau H_0 di tolak dan diterima H_1 pada taraf signifikansi 5%

Selanjutnya dari hasil koefisien kontingensi setelah adanya hasil uji hitungan korelasi didapatkan nilai indeks kuatnya hubungan (IKH) yaitu 0,90. Dari nilai indeks tersebut maka diidentifikasi bahwa memiliki pengaruh sangat kuat (Lampiran 3)

c. Analisis Strategi Pengendalian Perubahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Kecamatan Bacan

Berdasarkan analisis sebelumnya terbukti bahwa ada yang menyebabkan terjadinya pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan yaitu Jumlah penduduk, mata pencaharian dan harga lahan, Untuk dapat lakukan strategi pengendalian perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir maka diperlukan strategi yang tepat agar dapat meminimalisasi pengaruh perubahan penggunaan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan. Konsep yang digunakan untuk mencari strategi yang tepat pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis swot.

Analisis Swot adalah salah satu teknik analisis untuk mengkaji wilayah dalam satu lingkungan secara keseluruhan. Untuk mengkaji suatu strategi pengendalian perubahan pemanfaatan lahan perlu di lakukan analisis dengan melihat factor internal (yang muncul dari dalam wilayah pengembangan) terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta factor eksternal (yang ada atau datang dari luar wilayah) terdiri dari peluang dan ancaman. Data yang di gunakan dalam analisis swot merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis sebelumnya.

Dari hasil analisis sebelumnya maka diidentifikasi factor internal dan factor eksternal yang berperan dalam mengurangi

pengendalian pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan adalah sebagai berikut :

a. Analisis Faktor Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan merupakan unsur yang menjadikan strategi dalam mengurangi pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan dapat terwujud secara maksimal. Untuk memahaminya maka unsur kekuatan ini perlu di gambarkan potensi-potensi yang dapat mengurangi pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan yang timbul dari lingkungan internalnya, Unsur tersebut meliputi :

- Jumlah penduduk semakin berkembang pesat sehingga memicu terhadap pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan
- Jumlah mata pencaharian semakin meningkat dari tahun 2009-2013 ini akan terindikasi terhadap pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan
- Nilai atau harga lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan meningkat dari tahun ke tahun ini akan memicu pengaruh perubahan pemanfaatan lahan dengan adanya perkembangan yang amat pesat

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan adalah unsur yang perlu di pertimbangkan dalam merumuskan strategi untuk mengurangi faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan, Unsur kelemahan yang dimaksud adalah unsur yang timbul dari lingkungan wilayah pesisir Kecamatan Bacan, Unsur tersebut meliputi :

- Pengendalian pemanfaatan ruang masih lemah
- Sarana dan prasarana belum tersedia secara memadai sehingga tidak mampu menopang kegiatan masyarakat dengan baik.
- Peran serta masyarakat dalam pengendalian perubahan pemanfaatan lahan belum optimal

b. Analisis Faktor Eksternal

1. *Opportunities* (Peluang)

Unsur peluang sesungguhnya merupakan faktor yang timbul dari lingkungan eksternal yang harus dimanfaatkan secara optimal guna mengendalikan pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan, Beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal adalah sebagai berikut :

- Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tentang pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- Ketersediaan perangkat perundang-undang dan dokumen perencanaan tentang penggunaan lahan
- Kurang tegasnya tindakan terhadap penggunaan dan perubahan penggunaan lahan yang melanggar peraturan
- Peraturan tentang intensif dan disinsentif belum jelas

2. *Threats* (Ancaman)

Ancaman merupakan salah satu unsur yang perlu untuk dipikirkan dalam rumusan tentang pengendalian pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan, Unsur ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal yaitu meliputi :

- Sarana dan prasarana belum memadai untuk menunjang aktifitas masyarakat
- Kemungkinan memicu terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya yang akan menimbulkan masalah lingkungan.

c. **Formulasi Strategi**

Berdasarkan gambaran tentang adanya faktor pendorong dan penghambat yang diperkirakan berpengaruh terjadinya perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di

Kecamatan Bacan maka perlu di analisis strategi umum dalam pengendaliannya, Untuk itu maka digunakam formulasi strategi atas unsur-unsur kekuatan dan peluang (S-O) strategi atas unsur kekuatan dan ancaman (S-T) stategi atas unsure kelemahan (W-O) serta strategi atas unsur kelemahan dan ancaman (W-T)

– **Strategi S-O**

Dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan internal wilayah pesisir Kecamatan Bacan maka perlu Meningkatkan peran instansi dalam menumbuhkan kesadaran terhadap regulasi penataan ruang, Penerapan peraturan secara tegas Mengoptimalkan tupoksi perangkat teknis yang ada Mengoptimalkan sumberdya manusia yang ada untuk dapat meraih berbagai peluang yang ada di lingkungan eksternal wilayah pesisir Kecamatan Bacan

– **Strategi S-T**

Dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan internal wilayah pesisir di Kecamatan Perlu intensif dalam perpajakan untuk menggunakan lahan yang sesuai dengan rencana, Investasi harus mengacu pada rencana yang ada, Mengoptimalkan perangkat pemerintah kepada masyarakat tentang akibat negative penggunaan lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Selatan dan

Menggunakan semua perangkat kelembagaan dalam melakukan pengendalian pemanfaatan lahan dengan baik sehingga menciptakan ruang yang nyaman, aman dan produktif.

– **Strategi W-O**

Strategi dilakukan dengan cara mensisati kelemahan di lingkungan internal dengan cara meminimalisasi perubahan pemanfaatan lahan dan meningkatkan ketersediaannya sarana dan prasarana. Upaya tersebut dapat dengan mudah dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang dapat di lingkungan eksternal

– **Strategi W-T**

Strategi dilakukan dengan cara mensisati dan menekan kelemahan untuk bisa lebih terfokus dalam menagani berbagai ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaata lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan

Dengan menggunakan formulasi strategi tersebut diatas, maka dihasilkan berbagai rekomendasi strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah di wilayah pesisir Kecamatan Bacan terhadap strategi pengendalian perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan Sebagaimana pada table sebagai berikut:

Tabel. 4.21
Matriks SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk semakin berkembang sehingga pesat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan - Jumlah mata pencaharian semakin meningkat dari tahun 2009-2013 ini memiliki pengaruh namun sangat lemah terhadap pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan - Nilai atau harga lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan meningkat dari tahun ke tahun ini memiliki pengaruh sangat kuat terhadap perubahan pemanfaatan lahan dengan adanya perkembangan yang amat pesat 	<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>
<p style="text-align: center;">Peluang (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tentang pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. - Ketersediaan perangkat perundang-undang dan dokumen perencanaan tentang penggunaan lahan - Peraturan tentang intensif dan disinsentif belum jelas 	<p style="text-align: center;">Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran instansi dalam menumbuhkan kesadaran terhadap regulasi penataan ruang - Penerapan peraturan secara tegas - Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada 	<p style="text-align: center;">Ancaman (Trats)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemungkinan memicu terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya yang akan menimbulkan masalah lingkungan - Sarana dan prasarana belum memadai untuk menunjang aktifitas masyarakat.
<p style="text-align: center;">Kelemahan (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang tegasnya tindakan terhadap penggunaan dan perubahan penggunaan lahan yang melanggar peraturan perundang-undang - Pengendalian pemanfaatan ruang masih lemah - Peran serta masyarakat dalam pengendalian perubahan pemanfaatan lahan belum optimal - Sarana dan prasarana belum tersedia secara memadai sehingga tidak mampu menopang kegiatan masyarakat dengan baik 	<p style="text-align: center;">Strategi W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi dilakukan dengan cara mensiasi kelemahan di lingkungan internal dengan cara meminimalisasi perubahan pemanfaatan lahan dan meningkatkan ketersediaannya sarana dan prasarana. Upaya tersebut dapat dengan mudah dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang dapat di lingkungan eksternal 	<p style="text-align: center;">Strategi W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi dilakukan dengan cara mensiasi dan menekan kelemahan untuk bisa lebih terfokus dalam menangani berbagai ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir di Kecamatan Bacan

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan, maka dengan demikian dapat ditarik beberapa silogisme ataupun kesimpulan yakni :

A. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis korelasi didapatkan bahwa faktor yang berpengaruh terjadinya perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan adalah faktor perkembangan jumlah penduduk, faktor harga lahan dan faktor mata pencaharian
2. Strategi dalam mengurangi pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan. (1) Meningkatkan peran instansi dalam menumbuhkan kesadaran terhadap regulasi penataan ruang (2) Penerapan peraturan secara tegas (3) Perlu intensif dalam perpajakan untuk menggunakan lahan yang sesuai dengan rencana (4) Mengoptimalkan perangkat pemerintah kepada masyarakat tentang akibat negative penggunaan lahan yang tidak sesuai rencana (5) Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada (6) Menggunakan semua perangkat kelembagaan dalam melakukan pengendalian pemanfaatan lahan

B. Saran

Dalam upaya untuk mengurangi pengaruh perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan disarankan beberapa hal tersebut :

1. Dalam pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan, perlu memperhatikan faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan. yakni, perkembangan jumlah penduduk, harga lahan dan mata pencaharian serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan lahan.
2. Pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam pengadaan maupun izin yang akan diberikan untuk pembangunan maka pemerintah jangan hanya memberi izin namun lebih melihat keaturan-aturan yang telah ditetapkan agar kesesuaian pembangunan tidak mengakibatkan masalah
3. Semoga penelitian seperti ini dapat mejadi acuan kepada pihak akademisi dan praktisi dalam menemu kenali faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan serta pengaruh perubahan pemanfaatan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan pusat statistik Kabupaten Halmahera Selatan, 2012. Dalam angka 2013.
- Haeruddin ,1997, *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin,(Tidak Dipublikasikan) Ujung Pandang
- Ikatan Ahli Perencanaan IAP, 1997, *Kamus Tata Ruang*. Penerbit Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
- Jayadinata, J.T,1999 *Tata Guna Tana Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan Wilayah Bandung*,Penerbit ITB Bandung
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu,
- Sandy.I.M, 1981, *Pembangunan Wilayah Sehubungan dengan Tata Guna Tanah*, Jakarta
- Silalahi, S.B,1992 *Penggunaan Tanah Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Daerah Pedesaan Propinsi Sumatra Utara*
- Sitorus, S.R.P, 1986 *Evaluasi Sumber Daya Lahan* , Bandung : Tarsito
- Ibrahim Syahrul. 1998 *Pengendalian Pemanfaatn Ruang Yang Terpadu , Konsisten Dan Berkualitas* , Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , Vol.9, No. 2, Mei, Hal 26-38
- UU No. 1 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*,
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*
- Tuwu A. 2006. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Universitas Indonesia :Jakarta
- Zulkaidy, Denny 1999 *Pemahaman Perubahan Pemanfaatan Lahan Kota Sebagai Dasar Dari Kebijakan Penanganannya*. Bandung,Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , ITB

LAMPIRAN I

UJI KORELASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN WILAYAH PESISIR KECAMATAN BACAN

1. Faktor Perkembangan Jumlah Penduduk

Tahun	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (X)	Penggunaan Lahan (Y)	X ²	Y ²	XY
2009	9895	347	97911025	120409	3433565
2010	10500	347	110250000	120409	3643500
2011	10272	347	105513984	120409	3564384
2012	10178	356	114875524	126736	3815608
2013	10784	377	116294656	142129	4065568
Σ	52169	1774	544845189	630092	18522625

$$r = \frac{N \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Dik.

N = 5

Σ X = 52169

Σ Y = 1774

Σ XY = 18522625

Σ X² = 544845189

(Σ X)² = 2721604561

Σ Y² = 630092

(Σ Y)² = 3147076

$$r = \frac{5 \times 18522625 - 52169 \times 1774}{\sqrt{5 \times 544845189 - 2721604561} \times \sqrt{5 \times 630092 - 3147076}}$$

$$r = \frac{65319}{94184.73048}$$

$$r = 0.69$$

Interpretasi dengan menggunakan tabel nilai "r" product moment", sebagai berikut :

1. Mencari df (degrees of freedom) dengan rumus :

$$df = N - nr$$

Keterangan : N = Number of cases (Jumlah perlakuan data)

nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan

Sehingga berdasarkan rumus yang ada maka data yang dikorelasikan diatas adalah N = 5 dan nr = 2

2. Konsultasi dengan nilai "r" product moment", dengan :

$$df = 5 - 2 = 3$$

Maka pada r tabel diperoleh nilai r_t pada taraf signifikan 5% = 0,87 dan taraf signifikan 1% = 0,95. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa $r_{\text{hitung}} 0,69 < r_{\text{tabel}} 0,87$ maka ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. antara faktor pengaruh perubahan pemanfaatan lahan berdasarkan variabel perkembangan jumlah penduduk.

Untuk mengetahui besar hubungan variabel X dengan Y digunakan patokan interpretasi nilai persentase yang digunakan, yaitu:

Interpretasi Koefisien Korelasi

Nilai IKH	Sebutan
0,80 – 1,00	Hubungan sangat kuat
0,60 – 0,79	Hubungan kuat
0,40 – 0,59	Hubungan sedang
0,20 – 0,39	Hubungan lemah
0,00 – 0,19	Hubungan sangat lemah

Sumber: Maria M.L 2000 dalam Arianti (2009:11)

Berdasarkan hasil uji korelasi diatas dalam menentukan nilai r dimana nilai r tersebut menggambarkan adanya suatu hubungan atau interaksi, terkait dengan perkembangan jumlah penduduk dalam rentang waktu lima tahun terhadap penggunaan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan. Hasil dari uji korelasi tersebut memberikan suatu keterangan terkait dengan seberapa besar pengaruh yang terjadi.

Dalam menentukan tingkat korelasi tersebut maka mengacu pada pedoman yang ada dalam menentukan interval koefisien sehingga variabel jumlah penduduk berada pada koefisien 0,69 dengan tingkat hubungan kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk wilayah pesisir Kecamatan Bacan dari tahun terakhir meberikan pengaruh kuat terhadap perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

LAMPIRAN 2

2. Faktor Harga Lahan

Tahun	Harga Lahan (X)	Penggunaan Lahan (Y)	X ²	Y ²	XY
2009	10000	347	100000000	120409	3470000
2010	10000	347	100000000	120409	3470000
2011	15000	347	225000000	120409	5205000
2012	17500	356	306250000	126736	6230000
2013	25000	377	625000000	142129	9425000
Σ	77500	1774	135625000	630092	27800000

Dik.
 N = 5
 Σ X = 77500
 Σ Y = 1774
 Σ XY = 27800000
 Σ X² = 135625000
 (Σ X)² = 6006250000
 Σ Y² = 630092
 (Σ Y)² = 3147076

$$r = \frac{N \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{5 \times 27800000 - 77,50 \times 1774}{\sqrt{5 \times 1356150000 - 60006250000} \times \sqrt{5 \times 630092 - 3147076}}$$

$$r = \frac{15155000}{1619444.349}$$

$$r = 0.93$$

Interpretasi dengan menggunakan tabel nilai "r" *product moment*", sebagai berikut :

1. Mencari df (*degrees of freedom*) dengan rumus :

$$df = N - nr$$

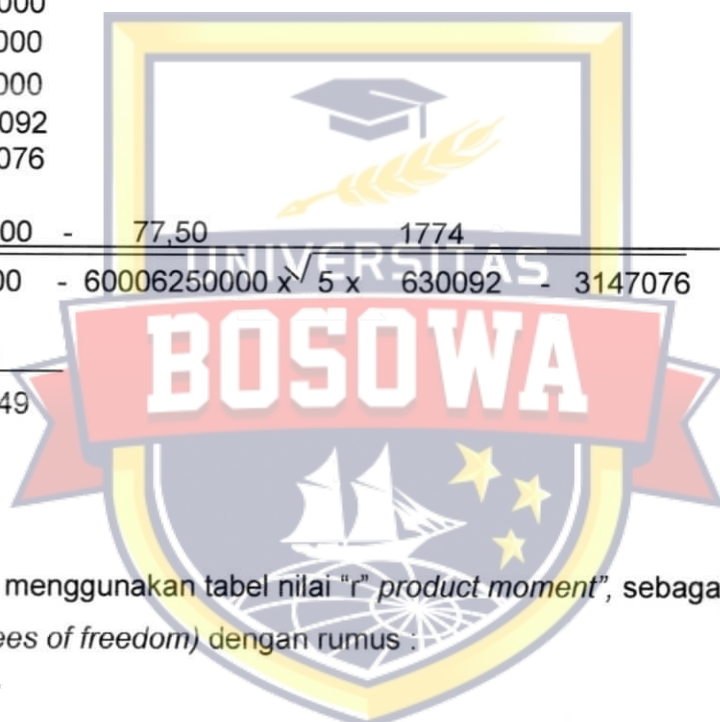
Keterangan : N = Number of cases (Jumlah perlakuan data)

nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan

Sehingga berdasarkan rumus yang ada maka data yang dikorelasikan diatas adalah N = 5 dan nr = 2

2. Konsultasi dengan nilai "r" *product moment*", dengan :

$$df = 5 - 2 = 3$$



Maka pada r tabel diperoleh nilai r_t pada taraf signifikan 5% = 0,87 dan taraf signifikan 1% = 0,93. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa $r_{hitung} 0,93 > r_{tabel} 0,87$ maka ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. antara faktor pengaruh perubahan pemanfaatan lahan berdasarkan variabel harga lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan

Untuk mengetahui besar hubungan variabel X dengan Y digunakan patokan interpretasi nilai persentase yang digunakan, yaitu:

Interpretasi Koefisien Korelasi

Nilai IKH	Sebutan
0,80 – 1,00	Hubungan sangat kuat
0,60 – 0,79	Hubungan kuat
0,40 – 0,59	Hubungan sedang
0,20 – 0,39	Hubungan lemah
0,00 – 0,19	Hubungan sangat lemah

Sumber: Maria M.L 2000 dalam Arianti (2009:11)

Berdasarkan hasil uji korelasi diatas dalam menentukan nilai r dimana nilai r tersebut menggambarkan adanya suatu hubungan atau interaksi, terkait dengan harga lahan dalam rentang waktu lima tahun terhadap penggunaan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan. Hasil dari uji korelasi tersebut memberikan suatu keterangan terkait dengan seberapa besar pengaruh yang terjadi.

Dalam menentukan tingkat korelasi tersebut maka mengacu pada pedoman yang ada dalam menentukan interval koefisien sehingga variabel harga lahan berada pada koefisien 0,93 dengan tingkat hubungan sangat kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan dari tahun terakhir meberikan pengaruh sangat kuat terhadap perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

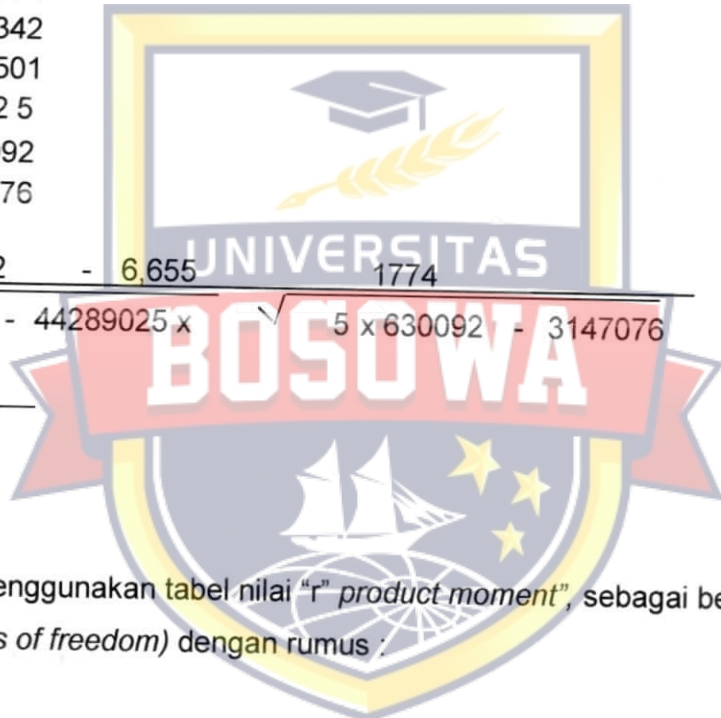
LAMPIRAN 3

3. Faktor Mata pencaharian

Tahun	Mata Pencaharian (X)	Penggunaan Lahan (Y)	X ²	Y ²	XY
2009	763	347	582169	120409	264761
2010	1057	347	1117249	120409	366779
2011	1377	347	1896129	120409	477819
2012	1223	356	1495729	126736	435388
2013	2235	377	4995225	142129	422595
Σ	6655	1774	10086501	630092	2387342

$$r = \frac{N \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Dik.
 N = 5
 Σ X = 6655
 Σ Y = 1774
 Σ XY = 2387342
 Σ X² = 10086501
 (Σ X)² = 44289025
 Σ Y² = 630092
 (Σ Y)² = 3147076



$$r = \frac{5 \times 2387342 - 6.655 \times 1774}{\sqrt{5 \times 10086501 - 44289025} \times \sqrt{5 \times 630092 - 3147076}}$$

$$r = \frac{130740}{144185.7702}$$

$$r = 0.90$$

Interpretasi dengan menggunakan tabel nilai "r" product moment", sebagai berikut :

1. Mencari df (degrees of freedom) dengan rumus :

$$df = N - nr$$

Keterangan : N = Number of cases (Jumlah perlakuan data)

nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan

Sehingga berdasarkan rumus yang ada maka data yang dikorelasikan diatas adalah N = 5 dan nr = 2

2. Konsultasi dengan nilai "r" product moment", dengan :

$$df = 5 - 2 = 3$$

Maka pada r tabel diperoleh nilai r_t pada taraf signifikan 5% = 0,87 dan taraf signifikan 1% = 0,90. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa $r_{hitung} 0,90 > r_{tabel} 0,87$ maka ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. antara faktor pengaruh perubahan pemanfaatan lahan berdasarkan variabel mata pencaharian wilayah pesisir Kecamatan Bacan

Untuk mengetahui besar hubungan variabel X dengan Y digunakan patokan interpretasi nilai persentase yang digunakan, yaitu:

Interpretasi Koefisien Korelasi

Nilai IKH	Sebutan
0,80 – 1,00	Hubungan sangat kuat
0,60 – 0,79	Hubungan kuat
0,40 – 0,59	Hubungan sedang
0,20 – 0,39	Hubungan lemah
0,00 – 0,19	Hubungan sangat lemah

Sumber: Maria M.L 2000 dalam Arianti (2009:11)

Berdasarkan hasil uji korelasi diatas dalam menentukan nilai r dimana nilai r tersebut menggambarkan adanya suatu hubungan atau interaksi, terkait dengan mata pencaharian dalam rentang waktu lima tahun terhadap penggunaan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan. Hasil dari uji korelasi tersebut memberikan suatu keterangan terkait dengan seberapa besar pengaruh yang terjadi.

Dalam menentukan tingkat korelasi tersebut maka mengacu pada pedoman yang ada dalam menentukan interval koefisien sehingga variabel mata pencaharian berada pada koefisien 0,90 dengan tingkat hubungan sangat kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mata pencaharian wilayah pesisir Kecamatan Bacan dari tahun terakhir meberikan pengaruh sangat kuat terhadap perubahan pemanfaatan lahan wilayah pesisir Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

LAMPIRAN 4

**TABEL NILAI KOEFISIEN KORELASI
"r" PRODUCT MOMENT TARAF SIGNIFIKAN 5% DAN 1%**

df	TARAF SIGNIFIKAN		df	TARAF SIGNIFIKAN	
	5%	1%		5%	1%
1	0,997	1,000	23	0,388	0,490
2	0,950	0,990	24	0,391	0,487
3	0,878	0,959	25	0,371	0,478
4	0,811	0,917	26	0,367	0,470
5	0,874	0,874	27	0,361	0,463
6	0,707	0,834	28	0,155	0,456
7	0,666	0,798	29	0,149	0,449
8	0,632	0,765	30	0,120	0,418
9	0,600	0,735	30	0,304	0,393
10	0,676	0,708	40	0,255	0,326
11	0,653	0,654	40	0,273	0,302
12	0,632	0,661	50	0,250	0,283
13	0,514	0,633	60	0,232	0,267
14	0,497	0,497	70	0,217	0,204
15	0,482	0,505	80	0,205	0,228
16	0,468	0,590	90	0,195	0,267
17	0,454	0,575	100	0,174	0,204
18	0,444	0,581	125	0,189	0,230
19	0,433	0,549	150	0,138	0,210
20	0,413	0,537	200	0,113	0,181
21	0,404	0,526	300	0,098	0,148
22	0,349	0,515	400	0,085	0,128

Disalin kembali dari : Robert K. Young dan Donald J. Veldman, **Introductory Statistics for The Behavioral Sciences**, New York, Holt, Rinehart Ana Winston, Inc, 1965, hal : 422 dalam(Sugiono,2006:)